

**STRATEGI PENOLAKAN RELOKASI OLEH INISIATOR
WARGA KAMPUNG AKUARIUM KECAMATAN
PENJARINGAN JAKARTA UTARA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Oleh :

DINDA 165120100111022

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2020





LEMBAR PENGESAHAN
STRATEGI PENOLAKAN RELOKASI OLEH INISIATOR WARGA
KAMPUNG AKUARIUM KECAMATAN PENJARINGAN
JAKARTA UTARA

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Dinda

165120100111022

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian sarjana
pada tanggal **17 Juni 2020**

Pembimbing,

Lutfi Amiruddin, M.Sc

NIK. 20130486 0909 1 001

Malang, 10 Agustus 2020

Mengetahui

Ketua Jurusan Sosiologi

Anif Fatma Chawa, M.Si., Ph.D

NIP. 19740308 200501 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda

NIM : 165120100111022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul:

**STRATEGI PENOLAKAN RELOKASI OLEH INISIATOR
WARGA KAMPUNG AKUARIUM KECAMATAN
PENJARINGAN JAKARTA UTARA**

Merupakan benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda dan sitasi yang terdapat dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian terbukti pernyataan ini tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi tersebut, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari penulisan skripsi tersebut.

Malang, 14 Juli 2020

Yang membuat pernyataan

Dinda

NIM 165120100111022



ABSTRAK

Dinda, 2020, Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Strategi Penolakan Relokasi Oleh Inisiator Warga Kampung Akuarium Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Pembimbing Lutfi Amiruddin.

Latar belakang penelitian ini didasari oleh kasus penggusuran paksa yang terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2016. Kasus penggusuran menjadi kasus yang biasa terjadi di kota-kota besar. Salah satu lokasi yang mengalami penggusuran paksa yakni Kampung Akuarium yang berada di Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penolakan relokasi yang dilakukan oleh warga.

Dengan menggunakan pendekatan teori pilihan rasional James Coleman, penelitian ini berusaha menganalisis strategi penolakan relokasi yang dilakukan oleh inisiator warga Kampung Akuarium. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan inisiator warga yang menolak direlokasi disebabkan atas rasionalitas berupa alasan ekonomi dan sosial bermasyarakat di Kampung Akuarium. Selanjutnya, strategi penolakan relokasi yang dilakukan inisiator warga dilakukan dengan cara bertahan di Kampung Akuarium pasca penggusuran, demo, dan melakukan gugatan *class action*. Dalam teori pilihan rasional milik Coleman, terdapat dua elemen penting yaitu aktor dan sumber daya. Keduanya memiliki hubungan antara kuasa dan kepentingan. Aktor dalam penelitian ini adalah inisiator warga Kampung Akuarium yang menolak direlokasi. Sementara itu, sumber daya yang dimiliki adalah berupa warga yang memiliki jabatan di tingkat RT, kesadaran untuk bergerak, dan solidaritas warga. Adanya sumber daya lain berupa relasi dengan LSM juga menjadi penting dalam proses penolakan relokasi. Adapun tujuan proses penolakan relokasi tersebut diketahui untuk mengembalikan Kampung Akuarium.

Kata kunci: Pilihan Rasional, Penggusuran, Penolakan Relokasi, Kampung Akuarium

ABSTRACT

Dinda, 2020, S1 Study Program in Sociology, Faculty of Social and Political Science, University of Brawijaya, Relocation Rejection Strategies by Initiators of Kampung Akuarium Penjaringan Sub-District North Jakarta, Supervisor Lutfi Amiruddin.

This research background was based on the case of forced evictions that happened in Jakarta in 2016. Eviction cases are common in big cities. One of the locations that experienced forced evictions was Kampung Aquarium in North Jakarta. This study aims to determine the relocation rejection strategy which is done by residents.

By using James Coleman's rational choice theory, this study try to analyze the relocation rejection strategy carried out by the initiator of Kampung Aquarium. The research methods used in this research was qualitative descriptive. Purposive sampling technique was used in this research to determine the informants. The data on this research was done through observation, interviews, and documentation techniques.

The result of the research showed that the initiator's reason who refused the relocation was caused due to rationality in the form of economic and social reasons in Kampung Aquarium. Furthermore, the relocation rejection strategy done by the initiators are stayed at Kampung Aquarium after eviction, demonstrations, and make a *class-action* lawsuit. In Coleman's rational choice theory, there are two important elements which are actors and resources. Both of them have a relationship between power and interests. The actor in this study was the initiator of the Kampung Aquarium community who refused to be relocated. Meanwhile, the resources owned are positions of the citizen who have a position at the neighborhood association (RT), awareness of movement, and community solidarity. The existence of other resources which is the relation with NGO is also important in the process of refusing the relocation. The purpose of the relocation refusal process was known to return Kampung Aquarium.

Keywords: Rational Choice, Eviction, Relocation Rejection, Kampung Akuarium

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirahim.

Segala puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Penolakan Relokasi Oleh Inisiator Warga Kampung Akuarium Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak berikut. Pertama, yakni Dinda, yang tidak lain adalah diri penulis sendiri yang sudah dapat menyelesaikan salah satu beban dan tanggung jawab di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, kepada keluarga yang senantiasa memberi dukungan secara moril dan materi sampai sejauh ini. Untuk Alm. Ayah, yang senantiasa menjadi pengingat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada keluarga atas segala kepercayaan yang sudah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang beserta jajarannya, kepada Ibu Anif Fatma Chawa, M.Si., Ph.D selaku ketua jurusan Sosiologi, serta seluruh dosen sosiologi atas segala ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Terima kasih yang tak terhingga juga diucapkan kepada Mas Lutfi Amiruddin, S.Sos., M.Sc selaku dosen pembimbing dan “wali kelas” yang selalu meluangkan waktunya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada Bapak Dhanny S. Sutopo, M.Si dan Mba Genta Mahardhika Rozalinna, MA selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam skripsi ini.

Tidak lupa juga ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh informan warga Kampung Akuarium dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktu serta membantu penulis dalam memberikan berbagai informasi, juga kepada

teman-teman Sosiologi 2016, B-SOS-16, khususnya Alievia, Fitri, Dea, Riana, Kirana yang sudah memberikan kesan tersendiri bagi penulis, serta kepada teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini. Sampai bertemu kembali di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, masukan serta saran yang membangun akan sangat berharga. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Malang, 14 Juli 2020

Penulis

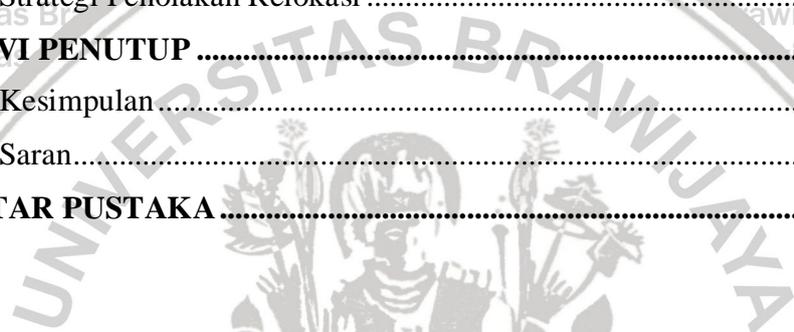


DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR BAGAN	xi
GLOSARIUM	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Definisi Konsep.....	14
2.2.1 Permukiman Kampung Kota.....	14
2.2.2 Penggusuran.....	15
2.2.3 Relokasi Permukiman.....	16
2.3 Kajian Teoritis Pilihan Rasional James Coleman.....	16
2.4 Alur Berfikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.3 Teknik Penentuan Informan.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Sumber Data.....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	32



3.7 Teknik Keabsahan Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM	35
4.1 Gambaran Permasalahan Penggusuran	35
4.2 Gambaran Umum Kampung Akuarium	42
4.3 Sejarah Kampung Akuarium	44
4.4 Profil Informan	46
4.5 Gambaran Umum Aktor	50
BAB V PEMBAHASAN	51
5.1 Aktor dan Sumber Daya dalam Penolakan Relokasi	51
5.2 Alasan Penolakan Relokasi	62
5.3 Strategi Penolakan Relokasi	67
BAB VI PENUTUP	81
6.1 Kesimpulan	81
6.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kronologi Penggusuran Kampung Akuarium.....	37
Tabel 2. Data Demografi Sebelum-Sesudah Penggusuran.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Skenario Umum Penataan Struktur Kawasan Kota Tua..... 36

Gambar 2. Peta Kampung Akuarium dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi..... 40

Gambar 3. Peta Kampung Akuarium..... 43

Gambar 4. Kondisi Shelter Kampung Akuarium..... 76

Gambar 5. Design Kampung Susun Bahari Akuarium..... 78



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Skema Alur Berfikir..... Univ 20



GLOSARIUM

CAP : Community Action Plan

JRMK : Jaringan Rakyat Miskin Kota

LBH Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

Rusunawa : Rumah Susun Sederhana Sewa

UPC : Urban Poor Consortium



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus penggusuran bukan merupakan fenomena baru di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok, di tahun 2016 sebanyak 193 kasus penggusuran paksa terjadi di DKI Jakarta (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2017). Angka tersebut meningkat dari kasus penggusuran paksa yang terjadi pada tahun 2015 yakni sebanyak 113 kasus. Berdasarkan laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap melakukan penggusuran paksa setiap tahunnya. Penggusuran paksa yang dilakukan pun seringkali terjadi dengan corak yang sama, yakni menggunakan jalan kekerasan dan tidak adanya kompensasi yang seimbang dengan kerugian yang dialami oleh korban (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2017).

Pada tahun 1999, Gubernur Sutiyoso melakukan penggusuran paksa melawan kaum miskin dan para migran (Human Rights Watch, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa kasus penggusuran tidak hanya terjadi pada masa kepemimpinan Ahok, melainkan sudah sering terjadi saat masa kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya. Guna mendukung hal tersebut, *Human Rights Watch* melaporkan kasus penggusuran yang terjadi saat zaman Sutiyoso. Jika dibandingkan dengan penggusuran paksa pada zaman Sutiyoso dan Ahok, maka pemerintah era Sutiyoso dan Fauzi Bowo melibatkan peran preman dalam melakukan penggusuran (Human Rights Watch, 2006, p. 16). Hal ini

berbeda dengan masa pemerintahan Ahok yang melibatkan TNI dan Polri saat melakukan penggusuran (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2016).

Kebijakan berupa penggusuran sangat populer terjadi di kota-kota kelas menengah dan dipandang sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah endemik banjir, kemacetan lalu lintas, dan pelanggaran hukum (Sibarani, 2017, p. 8). Menurut laporan LBH Jakarta, pada tahun 2016 silam terdapat 193 kasus penggusuran paksa dan 35 titik penggusuran diantaranya berada di Jakarta Utara (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2017). Dalam hal ini, kampung kota merupakan salah satu objek penggusuran yang seringkali dilakukan di Jakarta.

Salah satu perkampungan yang mengalami penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta yakni Kampung Akuarium yang berada di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam kasus ini, penggusuran Kampung Akuarium dilakukan oleh pemerintah guna merevitalisasi kawasan Kota Tua. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua. Pasca penggusuran, warga pun direkomendasikan pemerintah untuk direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Rawa Bebek, dan Cakung. Namun, upaya relokasi ini tidak sepenuhnya berhasil dilakukan untuk memindahkan warga ke rumah susun tersebut. Kondisi tersebut dibuktikan dengan adanya sekitar 150 rumah semi permanen pada tahun 2017 yang kembali didirikan oleh warga pasca setahun penggusuran (Apinino, 2017).

Penolakan relokasi tersebut membuat beberapa warga memilih untuk bertahan di wilayah penggusuran Kampung Akuarium. Awalnya, warga bertahan dengan cara membangun rumah sementara berupa *bedeng-bedeng*¹.

Namun seiring berjalannya waktu, kini warga yang menolak direlokasi pun telah menempati *shelter* yang akhirnya disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Shelter tersebut disediakan untuk warga pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Perlu dipahami bahwa relokasi bukan hanya sekadar memindahkan tempat tinggal, tetapi juga dapat memunculkan permasalahan baru lainnya. Dengan kata lain, relokasi menyangkut pertarungan antar berbagai konsep ruang seperti ruang ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup hingga ke ruang budaya (Prasetya & Fauziah, 2016). Lokasi rusunawa yang jauh menyulitkan warga Kampung Akuarium yang mayoritas berpenghasilan sebagai nelayan untuk mencapai tempat kerjanya. Hal ini menyebabkan warga harus mengeluarkan biaya lebih untuk mencapai tempat kerja. Di sisi lain, dengan direlokasi ke rumah susun, warga juga perlu membayar biaya berupa uang sewa rusun, air, dan token listrik. Adanya relokasi seolah menambah beban yang harus ditanggung oleh warga di Kampung Akuarium. Oleh karena itu, dari 345 KK yang mengalami penggusuran (Mamduh, 2018), 93 KK dan 500 jiwa warga diantaranya menolak untuk direlokasi dan menetap di Kampung Akuarium (Purba, 2018).

Selain dapat menimbulkan permasalahan ekonomi bagi warga, adanya relokasi juga dapat menyebabkan berubahnya kegiatan sosial antar warga

¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *bedeng* berarti rumah darurat (sementara) bagi para pekerja. Rumah *bedeng* biasanya terbuat dari material papan dan kayu.

Kampung Akuarium. Sebelum digusur, hubungan antar warga yang terbentuk di Kampung Akuarium sudah terbentuk sedemikian rupa akibat telah hidup dalam lingkungan yang sama selama bertahun-tahun. Jika kampung tersebut direlokasi, maka tatanan sosial antar warga Kampung Akuarium berpotensi untuk berubah. Mengingat, terdapat beberapa warga yang memilih untuk tinggal bersama saudaranya yang berada di luar Kampung Akuarium atau pun memilih untuk menyewa rumah di Kampung Luar Batang pasca penggusuran.

Selain itu, terdapat pula beberapa warga yang memilih untuk tinggal di rusunawa.

Terkait adanya proses penolakan relokasi ke rusunawa tersebut, muncul warga yang melakukan proses penolakan relokasi kampung. Adanya penolakan tersebut dilakukan oleh para inisiator penolakan relokasi di Kampung Akuarium. Hal tersebut menjadi penting karena tindakan yang dilakukan para inisiator berkaitan dengan rasionalitas mereka dalam melakukan penolakan relokasi.

Beberapa penelitian mengenai penggusuran dan relokasi telah dilakukan, seperti halnya yang dilakukan oleh Silalahi (2017). Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan relokasi bantaran sungai. Selanjutnya, penelitian Fhatoni, Purwoko, & Sardini (2017) melakukan penelitian mengenai Perlawanan Masyarakat Luar Batang Jakarta Terhadap Kebijakan Revitalisasi Kawasan Pesisir Pada Tahun 2016. Ketiga, yakni penelitian yang dilakukan oleh Iqbal & Vonika (2019) mengenai Dinamika Proses Relokasi di DKI Jakarta Studi Kasus: Kampung Akuarium di

Penjaringan, Jakarta Utara relokasi berdampak terhadap kesejahteraan dari sisi kondisi ekonomi.

Jika melihat beberapa penelitian terdahulu yang telah dituliskan di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan bagaimana aktor melakukan penolakan relokasi melalui berbagai strategi untuk bertahan di Kampung Akuarium. Dalam penelitian ini penulis juga berusaha meneliti mengenai inisiator warga yang menolak direlokasi dengan menetap di tempat tinggalnya pasca penggusuran. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kondisi pasca penggusuran dan pada warga yang berperan sebagai inisiator penolakan relokasi yang masih bertahan di Kampung Akuarium sejak penggusuran, sampai dengan telah dibangunnya *shelter* sebagai langkah rekonstruksi kampung yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Inisiator warga yang menolak relokasi Kampung Akuarium dipilih karena pada kasus penggusuran Kampung Akuarium, terdapat beberapa warga yang aktif melakukan penolakan terhadap upaya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah pasca penggusuran beberapa waktu lalu. Mendirikan bangunan *bedeng-bedeng*, menetap di Kampung Akuarium, serta melakukan gugatan adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh para inisiator warga dalam menolak relokasi tersebut. Penolakan relokasi yang dilakukan oleh warga yang berperan sebagai inisiator penolakan juga berkaitan erat dengan faktor ekonomi atau pekerjaan yang mereka miliki di Kampung Akuarium akan terancam.

Selain itu, lokasi rusunawa sebagai pilihan tempat tinggal baru mereka juga menyulitkan warga untuk mencapai lokasi tempat kerjanya. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk memfokuskan penelitian ini pada inisiator warga yang

menolak untuk direlokasi ke rusunawa dan tetap tinggal di Kampung Akuarium pasca penggusuran. Itulah sebabnya, peneliti memilih rumusan masalah terkait strategi penolakan relokasi yang dilakukan oleh inisiator warga Kampung Akuarium

Sementara itu, teori yang dipilih dalam penelitian ini yakni teori pilihan rasional milik James Coleman. Teori ini dipilih peneliti karena warga yang berperan sebagai inisiator dalam penolakan relokasi Kampung Akuarium menggunakan rasionalitas mereka untuk melakukan penolakan terhadap upaya relokasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta pasca penggusuran. Hal ini juga berhubungan dengan rasionalitas yang dimiliki oleh individu dapat berbeda-beda. Suatu hal yang dianggap tidak rasional bagi orang lain bisa jadi adalah sebuah pilihan yang paling rasional bagi orang yang lainnya. Pilihan rasional yang dipilih oleh warga yang berperan sebagai inisiator dalam menolak relokasi pun memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut dapat berkaitan dengan faktor perekonomian yang dimiliki warga di Kampung Akuarium, yakni warga mempertahankan pekerjaan yang mereka miliki di kampung tersebut. Melalui tujuan yang hendak dicapai, maka inisiator warga Kampung Akuarium pun melakukan beberapa cara dalam melakukan penolakan relokasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat yakni bagaimana strategi penolakan relokasi yang dilakukan oleh inisiator warga Kampung Akuarium?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penolakan relokasi yang dilakukan oleh inisiator warga Kampung Akuarium.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi mengenai fenomena penggusuran dan studi relokasi sebuah perkampungan di Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan kajian sosiologi lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi suatu bahan dalam konteks referensi penelitian terdahulu dengan analisis pilihan rasional dalam penolakan sebuah relokasi perkampungan di Jakarta. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, seperti Pemprov DKI Jakarta, serta pihak lainnya terkait penolakan relokasi Kampung Akuarium.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai sumber acuan penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Hal ini dilakukan guna menghindari penelitian yang bersifat sama. Selain itu, penelitian terdahulu juga bermanfaat dalam memperkaya bahan kajian penulis terkait objek penelitian ataupun teori dan konsep dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2017). Penelitian tersebut dilatarbelakangi dengan adanya permukiman kumuh Kampung Pulo yang berada di bantaran sungai, yakni bantaran Sungai Ciliwung. Keberadaan permukiman tersebut menyebabkan penyempitan bantaran sungai yang memicu banjir. Guna menangani bencana banjir yang terjadi hampir setiap tahun, Pemerintah Kota DKI Jakarta pun mengeluarkan kebijakan berupa Program Penataan Sungai Ciliwung. Akibatnya, warga Kampung Pulo terpaksa direlokasi ke Rusunawa Jatinegara Barat. Namun, proses relokasi tersebut diwarnai dengan adanya bentrokan fisik warga Kampung Pulo dengan Satpol PP. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan relokasi bantaran Sungai Ciliwung.

Dalam penelitian ini, Silalahi (2017) menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sementara itu, teori yang digunakan yakni teori Keberhasilan dan Kegagalan di Pasca Bencana Pemukiman Kembali (*Successes and Failures in Post Disaster Resettlement*) milik Anthony Oliver-Smith. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap beberapa pihak, yakni masyarakat Kampung Pulo, penghuni Rusunawa Jatinegara Barat, Dinas Perumahan & Gedung Pemda DKI/Pengelola Rusunawa Jatinegara Barat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ciliwung Merdeka yang terlibat dalam proses sebelum, saat, dan sesudah relokasi terjadi.

Hasil dari penelitian Silalahi (2017) adalah ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan penolakan warga Kampung Pulo terhadap kebijakan relokasi. Beberapa faktor penolakan tersebut, diantaranya faktor kehilangan hak milik atas tanah, kehilangan mata pencaharian, kehilangan status sosial dan kenyamanan bertetangga, kekhawatiran kehilangan komunikasi antar warga, ketidakcocokan rusun bagi warga, dan sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat dianggap kurang maksimal. Sementara itu, beberapa faktor penerimaan relokasi Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat yakni warga sudah tidak memiliki pilihan lain, rusunawa lebih bersih dan aman dari banjir, serta letak lokasi Rusunawa Jatinegara Barat. Di sisi lain, berikut adalah beberapa permasalahan yang menjadi dasar protes masyarakat terhadap relokasi Kampung Pulo yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan relokasi, adanya tuntutan ganti rugi tanah maupun bangunan yang tidak dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta, dan kehilangan akses ke Sungai

Ciliwung. Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini, diketahui bahwa kebijakan relokasi belum bisa dikatakan berhasil karena sejak awal pelaksanaan relokasi sudah mendapatkan penolakan dari masyarakat yang akan direlokasi (Silalahi, 2017).

Selanjutnya, Fhatoni, Purwoko, & Sardini (2017) melakukan penelitian mengenai Perlawanan Masyarakat Luar Batang Jakarta Terhadap Kebijakan Revitalisasi Kawasan Pesisir Pada Tahun 2016. Latar belakang penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah berupa revitalisasi kawasan pesisir Kampung Luar Batang Jakarta. Penggusuran kawasan pesisir laut Kampung Luar Jakarta pun memunculkan perlawanan dari masyarakat setempat. Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Camat Penjaringan pun mengeluarkan surat yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan revitalisasi tersebut. Dengan adanya surat tersebut, warga pun melakukan penolakan dan pertentangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang memfokuskan penelitian mengenai perlawanan masyarakat Luar Batang Jakarta terhadap kebijakan revitalisasi kawasan pesisir pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dinamika perlawanan masyarakat Luar Batang Jakarta terhadap kebijakan revitalisasi kawasan pesisir dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan perlawanan tersebut. Informan dalam penelitian ini diantaranya adalah aktor perlawanan dari masyarakat Luar Batang, beberapa masyarakat yang terkena dampak kebijakan revitalisasi, dan Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, untuk teknik pengumpulan data dilakukan

melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Pada penelitian ini juga menganalisis bagaimana teori gerakan sosial baru dengan kondisi perlawanan masyarakat Luar Batang Jakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Fhatoni, Purwoko, & Sardini (2017) mendapat hasil bahwa bentuk perlawanan masyarakat Kampung Luar Batang dilakukan dalam tiga bentuk, yakni melakukan aksi massa sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap kebijakan Pemproy DKI Jakarta yang berlangsung pada 11 April 2016, melalui jalur hukum dengan memperjuangkan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, dan adanya diplomasi dengan membangun jaringan sektoral guna mendapatkan dukungan dan perhatian dari pihak luar sehingga pergerakan masyarakat dapat diketahui. Diketahui pula bahwa masyarakat membentuk wadah pergerakan dengan nama Laskar Kampung Luar Batang. Sementara itu, beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan diantaranya dipengaruhi oleh faktor historis, agama, hak atas tanah, dan kebijakan (Fhatoni, Purwoko, & Sardini, 2017, p. 13)

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Iqbal & Vonika (2019). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tingkat kepadatan penduduk yang terjadi di Jakarta. Angka kepadatan tersebut tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan lahan yang dapat berdampak pada ketersediaan lahan bagi tempat tinggal warga. Akibatnya, muncul bangunan yang didirikan tanpa penataan yang baik sehingga menjadi pemukiman kumuh. Penanganan pemukiman kumuh di DKI Jakarta pun kerap kali menjadikan penggusuran (relokasi) sebagai sebuah solusi pamungkas.

Kampung Akuarium menjadi salah satu tempat yang terkena kebijakan relokasi. Proses relokasi pun mendapatkan perlawanan dari warga sehingga menjadi bentrok. Penggunaan TNI-Polri dalam proses relokasi serta berbagai aturan dan hukum yang dilanggar menjadikan proses relokasi di Kampung Akuarium menarik untuk diteliti.

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang diharapkan dapat menggambarkan bagaimana proses persiapan relokasi, proses relokasi dan kondisi pasca relokasi. Sementara itu, penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika yang terjadi sebelum dan sesudah proses relokasi dan menggambarkan hak-hak warga yang bertahan di Kampung Akuarium (Iqbal & Vonika, 2019).

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat tantangan dalam proses relokasi berupa adanya konflik horizontal dan vertikal, kurangnya sosialisasi, proses relokasi yang singkat, dan penolakan. Sementara itu, untuk dampak sosial ekonomi yang timbul diantaranya adalah hilangnya sistem sosial di pemukiman lama, kerentanan ekonomi, dan status kependudukan yang tidak jelas. Relokasi Kampung Akuarium juga dipahami sebagai kegagalan sebuah proses. Hal ini karena bangunan yang berdiri di Kampung Akuarium tidak lagi hanya sebagai tempat tinggal semata, namun sebuah jaringan sosial di antara penghuninya telah terbentuk. Namun, kemudian relokasi diberlakukan dengan alasan warga

menempati tanah milik pemerintah dalam rangka mendukung program pemerintah dalam melakukan pembangunan kota.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal & Vonika (2019) juga membahas bahwa dalam proses relokasi tersebut, tidak terdapat sinergisitas antara Pemda DKI dan warga Kampung Akuarium. Diketahui bahwa Pemda DKI mengabaikan prinsip dasar pembangunan dan hanya berfokus pada pembangunan fisik infrastruktur belaka. Pemangku kekuasaan perlu ingat bahwa ketika relokasi gagal maka kondisi itu dapat menyebabkan kontra-produktif dalam proses pembangunan kota. Kegagalan tersebut dapat menyebabkan persoalan kemiskinan semakin parah dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial lainnya, seperti kriminalitas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hingga prostitusi yang dapat menjadi beban baru bagi kota yang sedang giat-giat membangun. Relokasi sebaiknya menjadi solusi terakhir dalam mengatasi persoalan perkampungan padat dan kumuh di kota besar.

Melalui ketiga penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni membahas mengenai kebijakan pembangunan berupa program relokasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, perbedaan yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah terkait dengan fenomena berupa adanya inisiator warga yang sepenuhnya menolak untuk direlokasi dan bertahan di Kampung Akuarium. Jadi, peneliti berfokus pada para aktor yakni warga Kampung Akuarium yang aktif melakukan penolakan relokasi, serta strategi yang dilakukan untuk melakukan penolakan relokasi di Kampung Akuarium. Warga yang menjadi inisiator penolakan relokasi juga masih menetap di Kampung Akuarium.

Selain itu, dalam penelitian kali ini penulis juga berfokus pada pilihan rasional inisiator warga Kampung Akuarium dalam menolak relokasi.

Terlebih, penolakan relokasi tersebut mencapai wacana dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan dan membangun kembali Kampung Akuarium.

Hal ini menjadi menarik karena tidak banyaknya wilayah pasca penggusuran yang dapat dikembalikan seperti semula, terutama wilayah kampung sebagai tempat tinggal.

2.2 Definisi Konsep

2.2.1 Permukiman Kampung Kota

Fenomena kampung kota sering ditemui keberadaannya di negara-negara berkembang. Permukiman kampung kota sudah menggejala sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda (Handayani, 2009). Awal mulanya, kampung kota terbentuk sebagai kampung pribumi di kota-kota saat masa kolonial. Bagus P. Wiryomartono (1995) mengungkapkan bahwa kampung kota adalah permukiman yang tumbuh di kawasan urban tanpa perencanaan infrastruktur dan jaringan ekonomi kota (Handayani, 2009).

Berbagai istilah akademik lainnya mengenai definisi kampung kota juga diungkapkan, salah satunya yakni menurut Prof. Ir. Bakti Setiawan, kampung kota bisa juga disebut sebagai *informal settlement*, *illegal settlement*, *slums* atau *spontaneous settlement / shelter* (Nursyahbani & Pigawati, 2015). Budihardjo (1997) dalam (Nursyahbani & Pigawati, 2015) mengungkapkan bahwa kehadiran kampung kota dapat menghadirkan berbagai masalah yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan kondisi sosial budaya ekonomi penduduknya yang dapat

menyebabkan munculnya pemukiman kumuh dalam kampung kota tersebut. Kondisi kampung kota secara fisik juga biasanya diindentikan dengan ketidakteraturan hingga kondisi kumuh.

2.2.2 Penggusuran

Fenomena penggusuran biasanya terjadi dalam skala besar, dimana sejumlah besar masyarakat dipaksa untuk pindah dari rumah tempat tinggalnya. Penggusuran biasanya ditujukan kepada orang miskin, penghuni liar atau pemukiman liar (Manggar, 2011). Menurut hukum internasional, penggusuran dijelaskan sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia, namun pemerintah di banyak negara tetap menggunakan penggusuran sebagai alat pembangunan, kontrol demografi, dan eksklusi sosial. Adanya penggusuran juga seringkali diartikan sebagai penertiban kebijakan pemerintah daerah yang mengatasnamakan tertib sosial.

Dalam hal ini, laporan LBH Jakarta menyatakan bahwa untuk mengukur sebuah penggusuran tergolong dalam penggusuran paksa atau tidak, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan standar HAM. Penggusuran yang sesuai dengan standar HAM akan merelokasi warga terlebih dahulu ke tempat tinggal baru yang layak sebelum proses penggusuran dilakukan, sehingga saat proses penggusuran dilakukan, warga terdampak sudah tidak berada pada lahan yang digusur. Sementara itu, sebuah penggusuran dikategorikan sebagai penggusuran paksa apabila prosesnya dilaksanakan bertentangan dengan standar HAM, seperti memindahkan warga terdampak tanpa musyawarah atau solusi

yang memadai atau melakukan pengosongan lahan saat warga masih berada pada area tersebut (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2017).

Sementara itu, dalam Pasal 4 Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 pengusuran paksa merupakan pemindahan orang atau keluarga dari tanah yang sedang ia tempati, baik secara permanen ataupun sementara, di luar kehendak pribadinya tanpa dilindungi oleh ketentuan hukum yang memadai dan melanggar hak-haknya sebagai manusia (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2017).

2.2.3 Relokasi Permukiman

Ridlo mendefinisikan relokasi atau *resettlement* sebagai proses pemindahan penduduk dari lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya ke lokasi baru yang disiapkan sesuai peruntukan kota (Mokoginta, Gosal, & Supardjo, 2015). Selain itu, Binsar M. Gulton mengungkapkan bahwa relokasi sering diartikan sebagai pemindahan tempat dari segi ruang geografis. Padahal, tidak dapat dipungkiri bahwa relokasi menyangkut pertarungan antar berbagai konsep ruang, seperti ruang ekonomi, sosial, politik hidup hingga ke ruang budaya (Prasetya & Fauziah, 2016).

2.3 Kajian Teoritis Pilihan Rasional James Coleman

Landasan teori dalam penelitian ini yakni menggunakan teori pilihan rasional James Coleman. Peneliti memilih teori pilihan rasional Coleman karena rasionalitas yang dimiliki oleh setiap individu dapat dikatakan berbeda-beda. Individu yang menganggap sebuah hal rasional dapat dianggap tidak rasional oleh individu yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui

pilihan rasional inisiator warga Kampung Akuarium dalam menolak relokasi Kampung Akuarium.

Coleman mengungkapkan bahwa teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang senantiasa memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dengan kata lain, aktor mempunyai tindakan yang tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut (Ritzer, 2014). Ide dasar teori pilihan rasional Coleman terletak pada orang-orang bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan, dengan tujuan dan tindakan-tindakan itu dibentuk oleh nilai atau pilihan-pilihan (Ritzer, 2012, p. 759).

Namun, pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang terpenting adalah kenyataan tindakan aktor dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

Pada tahun 1989, Coleman menerbitkan jurnal *Rationality and Society* yang bersifat interdisipliner atau yang disebut Coleman sebagai “paradigma tindakan rasional” yang berarti satu-satunya teori dengan kemungkinan menghasilkan integrasi paradigmatis (Ritzer, 2012, p. 756). Coleman juga berargumen bahwa pendekatan itu beroperasi dari suatu dasar di dalam individualisme metodologis dan menggunakan teori pilihan rasional sebagai dasar level mikro untuk menjelaskan fenomena di level makro.

Coleman (1990) memperluas model hubungan mikro-makro berdasarkan pendekatan pilihan rasional yang berasal dari ilmu ekonomi (Ritzer & Goodman, 2004). Mengingat, teori pilihan rasional memiliki prinsip

dasar yang berasal dari ekonomi neoklasik. Melalui konsepsi rasionalitas yang digunakan dalam ilmu ekonomi, maka konsepsi ini berpijak pada gagasan tentang bermacam tindakan (atau bermacam barang) yang memiliki kegunaan tertentu bagi si pelaku dan disertai dengan mengatakan bahwa si pelaku memilih tindakan yang akan memaksimalkan kegunaan itu (Coleman, 2011). Dengan kata lain bahwa Coleman beranggapan konseptualisasi yang berasal dari ekonomi dibutuhkan untuk melihat para aktor memilih tindakan-tindakan yang akan memaksimalkan manfaat atau pemuasan keinginan-keinginan mereka.

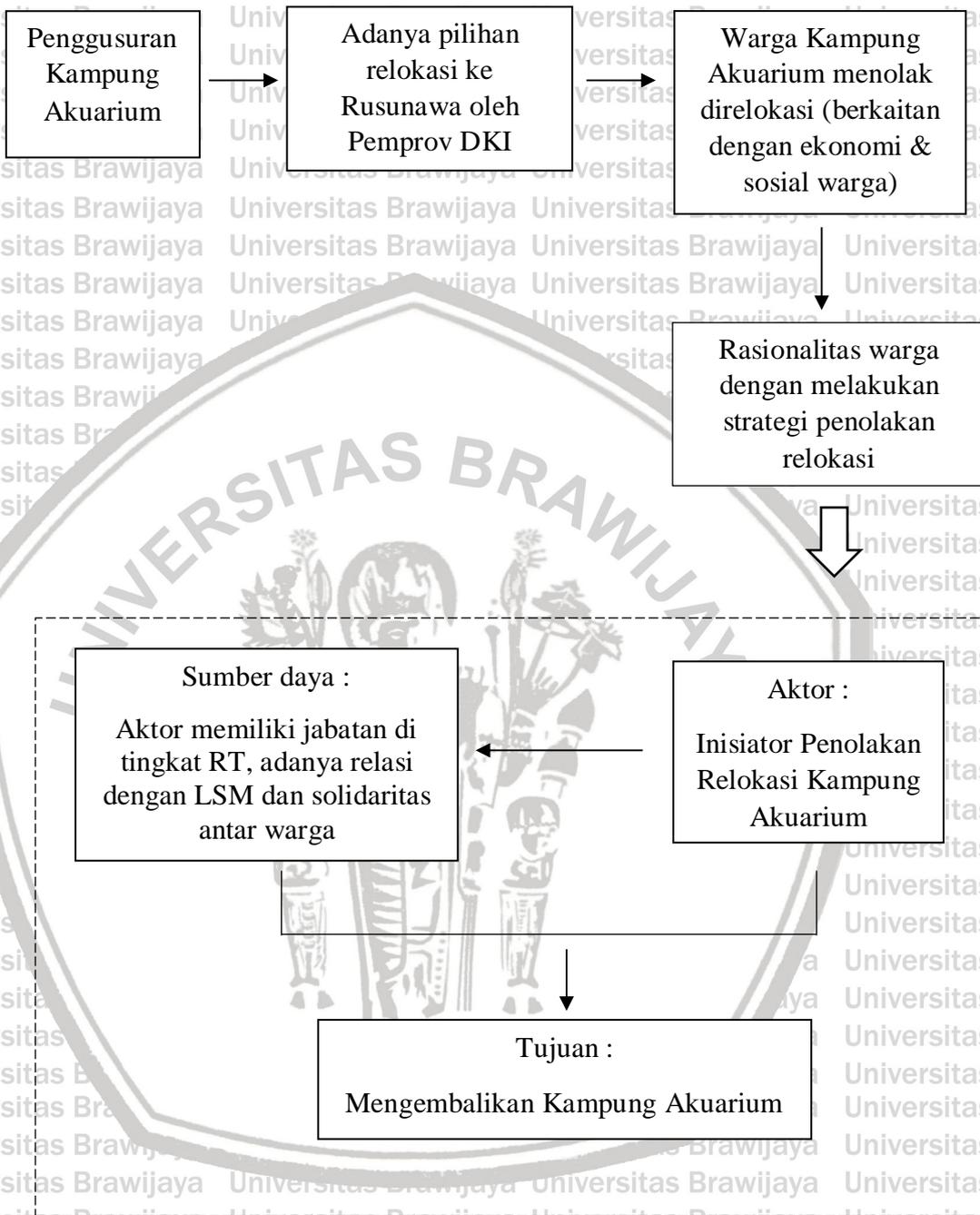
Kemudian, pada tahun 1990 buku *Foundations of Social Theory* diterbitkannya dan berpengaruh pada perspektif pilihan rasional (Ritzer, 2014, p. 365). Melalui buku *Foundations of Social Theory*, penjelasan Coleman menekankan bahwa sosiologi harus memfokuskan pada sistem-sistem sosial, di mana sistem sosial harus dijelaskan melalui faktor internal, yakni para individu. Bagi Coleman, melalui level individu, fakta data dapat dikumpulkan dan disusun untuk menghasilkan level sistem (Ritzer, 2012).

Terdapat dua elemen utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan sumber daya. Hubungan antara pelaku dan sumber merupakan hubungan antara kuasa dan kepentingan (Coleman, 2011, p. 37). Aktor melakukan suatu tindakan tertentu untuk memenuhi kepentingannya terhadap sumber daya yang diinginkan (Savitri & Legowo, 2015). Dalam perspektif Coleman, aktor menjadi fokus teori pilihan rasional karena aktor dianggap memiliki tujuan tertentu dalam melakukan tindakan (Lestari & Mudzakkir, 2016). Aktor juga memiliki preferensi atau nilai terhadap tindakan yang dilakukan. Menjadi

penting bagi aktor untuk melakukan sebuah tindakan yang konsisten agar aktor dapat mencapai tujuannya.

Sementara itu, sumber daya dimaknai sebagai hal-hal yang dikendalikan oleh para aktor. Sumber daya juga dimaknai sebagai sarana atau alat yang dapat digunakan oleh aktor (Hakim & Legowo, 2015). Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa aktor yakni terkait warga yang menjadi inisiator yang melakukan penolakan untuk direlokasi ke rusunawa pasca pengurusan di Kampung Akuarium. Sementara itu, sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya internal yang dimiliki masing-masing aktor, seperti pernah dan sedang menjabat sebagai pemegang kepentingan di tingkat RT, dan adanya solidaritas warga. Selain itu, para aktor juga memiliki sumber daya lain berupa adanya relasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membantu warga dalam melakukan proses penolakan relokasi. Selain itu, solidaritas warga dan adanya kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam menolak relokasi juga menjadi penting dalam penolakan ini.

2.4 Alur Berfikir



Bagan 1. Skema Alur Berfikir

Keterangan :
 → : Menjelaskan sebuah kondisi
 ⇨ : Unsur utama dalam teori



Berdasarkan skema alur berfikir di atas, peneliti berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu terkait dengan pilihan rasional inisiator warga dalam menolak relokasi Kampung Akuarium. Diawali dari adanya peristiwa penggusuran yang terjadi di Kampung Akuarium. Peristiwa penggusuran itu pun dipicu oleh kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang bertujuan untuk merevitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta. Akibat kebijakan tersebut, maka Pemprov DKI pun memberikan pilihan relokasi ke beberapa rusunawa. Sayangnya, tidak semua warga Kampung Akuarium bersedia untuk direlokasi, sehingga penggusuran pun tetap dilakukan dan terdapat warga yang menolak untuk direlokasi.

Penolakan relokasi tersebut berkaitan dengan ekonomi warga seperti pekerjaan keseharian warga dan biaya pengeluaran sehari-hari jika mereka direlokasi. Selain itu, adanya kekhawatiran terjadinya perbedaan keadaan sosial yang sudah terbentuk di Kampung Akuarium juga menjadi alasan warga yang menolak direlokasi. Akibatnya, warga memilih untuk melakukan strategi penolakan relokasi yang dibentuk atas rasionalitas mereka. Strategi penolakan yang dilakukan adalah cara warga untuk bertahan di Kampung Akuarium dan menolak direlokasi.

Dengan fenomena seperti itu, maka peneliti berusaha untuk mengkaji proses strategi yang dilakukan oleh warga dalam melakukan penolakan relokasi dengan menggunakan teori pilihan rasional milik James Coleman.

Cara berpikir Coleman dalam teori ini berfokus pada individu, hal tersebut berkaitan dengan fakta bahwa data biasanya dikumpulkan pada level individual dan kemudian dikumpulkan atau disusun untuk menghasilkan level sistem

(Ritzer, 2012, p. 757). Kemudian, ide dasar dalam pilihan rasional Coleman terkait dengan tindakan individu yang mengarah ke suatu tujuan. Tindakan dan tujuan itu pun dibentuk oleh pilihan-pilihan. Bagi Coleman, dirinya menggunakan konsep rasionalitas yang berasal dari ilmu ekonomi, dimana konsep tersebut berpijak pada gagasan tentang bermacam tindakan yang memiliki kegunaan tertentu bagi si pelaku dan bahwa si pelaku memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan itu (Coleman, 2011). Beberapa strategi penolakan relokasi, seperti melakukan bertahan di Kampung Akuarium, melakukan demo, dan melakukan gugatan *class action* adalah cara para warga yang dipilih untuk memaksimalkan proses penolakan relokasi tersebut.

Penolakan yang dilakukan oleh individu atau aktor yakni inisiator warga tentu memiliki tujuan yang ingin mereka capai. Tujuan tersebut berkaitan dengan mengembalikan Kampung Akuarium yang telah digusur. Selain itu, inisiator warga dalam menolak relokasi yang diberikan oleh pemerintah juga terkait dengan mempertahankan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh warga. Secara singkat, penolakan warga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari warga.

Terdapat dua unsur utama dalam teori Coleman yang meliputi aktor dan sumber daya. Aktor di sini yakni inisiator warga yang menolak relokasi Kampung Akuarium. Inisiator yang dimaksud di sini adalah beberapa warga yang aktif melakukan penolakan relokasi secara langsung dan menjadi perwakilan warga Kampung Akuarium lainnya. Sementara itu, sumber daya dalam penelitian ini berkaitan dengan masing-masing sumber daya yang

dimiliki oleh aktor, seperti kesadaran untuk bergerak, pernah memegang jabatan di tingkat RT ataupun sedang menjadi orang yang memegang kepentingan di tingkat RT. Sehingga, hal tersebut memiliki membentuk relasi dengan pihak pemerintahan di tingkat kelurahan, kecamatan dsb dan dapat mempermudah para aktor dalam melakukan proses penolakan relokasi. Sumber daya lainnya adalah solidaritas warga dalam menolak relokasi, serta adanya relasi dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Adanya sumber daya adalah salah satu hal yang dapat dikendalikan dan memiliki kepentingan bagi aktor guna mencapai tujuannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dan berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016). Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2016). Dalam metode kualitatif, peneliti menjadi satu-satunya instrumen penelitian yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh dengan mengutamakan interaksi komunikasi yang bersifat mendalam untuk mendapatkan suatu pemahaman dan pemaknaan.

Melalui metode kualitatif, maka dapat dijelaskan mengenai strategi penolakan relokasi yang dilakukan oleh inisiator warga Kampung Akuarium. Selanjutnya, pilihan rasional semacam apa yang mereka ambil sehingga lebih memilih untuk tetap menetap di Kampung Akuarium. Metode penelitian kualitatif dirasa mampu untuk menjelaskan secara lebih luas dan mendalam terkait penolakan relokasi yang dilakukan oleh inisiator penolakan relokasi di Kampung Akuarium. Selain itu, dalam penelitian kualitatif juga dapat menjelaskan pemaknaan dan pengalaman individu yang mengalami peristiwa pengusuran dan menolak relokasi Kampung Akuarium. Mengingat, apabila menggunakan metode kuantitatif maka data yang didapatkan akan terbatas pada instrumen kuesioner saja.

Sementara itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bagi Czarniawska (2004) merupakan tipe desain kualitatif yang narasinya dipahami sebagai teks yang dituturkan atau dituliskan dengan menceritakan tentang peristiwa/aksi atau rangkaian peristiwa/aksi yang terhubung secara kronologis (Creswell, 2015).

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, maka peneliti dapat memberikan gambaran dan pemahaman terkait proses penolakan relokasi inisiator Kampung Akuarium dimulai dari adanya peristiwa penggusuran, berdirinya *shelter*, sampai adanya wacana pembangunan kembali kampung secara permanen.

Beberapa ciri utama yang dimiliki oleh pendekatan kualitatif deskriptif (naratif) yakni peneliti mengumpulkan cerita dari individu, dokumen, dan percakapan kelompok tentang pengalaman individual yang dituturkan, cerita naratif dikumpulkan melalui beragam bentuk data seperti melalui wawancara, pengamatan, dokumen, gambar, dan sebagainya. Selanjutnya cerita naratif seringkali didengar dan disusun oleh para peneliti menjadi suatu kronologi meskipun cerita tersebut mungkin tidak diceritakan secara kronologis oleh para partisipan (Creswell, 2015). Jadi, melalui pendekatan kualitatif deskriptif diharapkan peneliti dapat menjawab rumusan masalah berdasarkan pengalaman sudut pandang inisiator warga Kampung Akuarium saat mengalami penggusuran dan melakukan penolakan relokasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kampung Akuarium yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pemilihan lokasi penelitian

dilakukan di Kampung Akuarium karena wilayah ini menjadi salah satu wilayah yang mengalami penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2016 silam. Selain itu, terdapat peristiwa menarik yakni Kampung Akuarium kembali dibangun oleh warga pasca penggusuran. Sehingga, kondisi Kampung Akuarium yang awalnya sudah rata oleh tanah dikembalikan lagi oleh warga dengan membangun rumah liar sementara berupa bedeng-bedeng. Peristiwa itupun menunjukkan bahwa warga Kampung Akuarium menolak direlokasi ke rusunawa.

Setelah pergantian kepemimpinan gubernur atau dua tahun pasca penggusuran, Pemprov DKI Jakarta juga membangun *shelter* untuk tempat tinggal sementara warga di Kampung Akuarium guna menggantikan rumah bedeng yang awalnya dibangun oleh warga. Kondisi tersebut menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Kampung Akuarium. Berdasarkan berita terakhir, terdapat pula wacana kesepakatan antara Pemda DKI Jakarta dan Kampung Akuarium untuk kembali membangun Kampung Akuarium sebagai Kampung Susun Bahari Akuarium. Kemudian, waktu penelitian dilakukan dimulai sejak Februari 2019 terhitung sejak proses penyusunan proposal penelitian hingga May 2020 saat laporan hasil penelitian selesai.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam melakukan penelitian di lapangan, peneliti membutuhkan informan untuk menggali informasi yang ingin didapatkan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan melalui teknik *purposive*.

Teknik *purposive* dapat diartikan sebagai teknik pengambilan sampel sumber

data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini didasarkan atas, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016, p. 219).

Sementara itu, peneliti menentukan beberapa informan dengan kriteria yakni warga Kampung Akuarium yang mengalami penggusuran, menolak program relokasi, serta masih menetap di Kampung Akuarium.

Berdasarkan kriteria tersebut maka informan dalam penelitian ini pun dibagi menjadi tiga, yaitu:

(1) Informan kunci (*key informan*), yakni mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Informan kunci juga dinilai sebagai orang yang mengetahui kondisi masyarakat serta dinamika penolakan relokasi yang terjadi di Kampung Akuarium.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah warga yang berperan sebagai koordinator penolakan relokasi (Informan 3);

(2) Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam penolakan relokasi Kampung Akuarium. Informan utama dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang juga aktif melakukan penolakan relokasi ke rusunawa (Informan 1 & 2);

(3) Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi guna membandingkan dan melihat sudut pandang lain berdasarkan informasi yang sebelumnya sudah didapatkan berdasarkan informan utama (Informan 4).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi serangkaian proses penting untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

a. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yaitu pada masyarakat di Kampung Akuarium. Observasi berupa turun lapangan digunakan guna melihat kondisi sosial yang terjadi pada warga Kampung Akuarium. Tujuan observasi dilakukan guna mengembangkan pemahaman menyeluruh terkait kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari maupun proses interaksi sosial yang berlangsung dalam lingkungan sosial tertentu (Wuisman, 1991).

Dalam proses observasi, peneliti menggunakan jenis observasi “pengamat sebagai partisipan”. Pada observasi pengamat sebagai partisipan, peneliti dituntut untuk melakukan interaksi sosial dengan anggota lingkungan sesuai dengan keperluan penelitiannya (Wuisman, 1991). Peneliti juga tidak bermaksud mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan anggota lingkungan, namun mempertahankan sikap ilmuwan. Melalui teknik observasi jenis ini, peneliti dapat mengungkapkan tujuan penelitian kepada informan (Wuisman, 1991, p. 79). Oleh karena itu, teknik observasi ini dapat mengkaji gambaran umum yang menjadi permasalahan serta alasan inisiator warga Kampung Akuarium dalam

menolak relokasi. Peneliti memilih menggunakan observasi “pengamat sebagai partisipan” dikarenakan peneliti tidak sepenuhnya mengikuti atau melakukan aktivitas yang dilakukan oleh informan. Namun, hal ini juga tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan tertentu yang ada di Kampung Akuarium.

Melalui observasi, diketahui bahwa masing-masing aktor memiliki tugasnya masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian kerja yang dimiliki oleh para informan. Pembagian kerja tersebut meliputi hal-hal seperti, perihal administrasi warga, juga kegiatan terkait dengan kehidupan keseharian di *shelter* Kampung Akuarium. Selain itu, diketahui pula gambaran kehidupan sehari-hari warga. Melalui observasi pula, peneliti mendapatkan informasi bahwa design Kampung Akuarium yang akan dibangun secara permanen telah selesai dan menunggu realisasi pembangunan dari pihak Pemprov DKI Jakarta.

b. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2012) menjelaskan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Subur, 2013). Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis (Sugiyono, 2016). Sementara itu, wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan

secara lebih terbuka yang berarti informan yang diwawancarai dapat diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2016, p. 233).

Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur karena peneliti dapat memunculkan pertanyaan tambahan saat proses wawancara berlangsung dan tidak hanya terfokus pada daftar pedoman pertanyaan (*guide interview*). Melalui hal ini, peneliti diharapkan dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pilihan rasional inisiator warga Kampung Akuarium dalam menolak relokasi. Sehingga, dari hasil wawancara akan diperoleh data untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud adalah data yang diperoleh oleh peneliti berupa gambar yang terkait dengan gambaran pengurusan serta program relokasi Kampung Akuarium yang didapat di lapangan. Dokumentasi tersebut juga diantaranya terkait dengan kondisi Kampung Akuarium saat peneliti melakukan turun lapang maupun proses wawancara. Dokumentasi dapat dilakukan dengan menggunakan foto dan audio. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan fitur kamera dan audio yang ada pada *smartphone* saat melakukan dokumentasi ketika melakukan observasi maupun wawancara dengan warga Kampung Akuarium sehingga data yang didapatkan dapat dilihat berkali-kali.

3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari orang pertama dan diperoleh melalui wawancara langsung dengan warga Kampung Akuarium yang menolak untuk direlokasi. Selain itu, data primer juga meliputi proses observasi yang dilakukan di lapangan. Melalui proses wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang dapat menjawab rumusan masalah, sehingga melalui data primer peneliti mendapatkan data yang akurat karena adanya keterlibatan langsung dengan warga Kampung Akuarium yang menolak untuk direlokasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka seperti berita di media *online*, serta jurnal yang berkaitan dengan relokasi Kampung Kota. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait jumlah dan titik penggusuran yang terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2016. Selain itu, peneliti juga menggunakan beberapa artikel yang dimuat dalam media online terkait berita penggusuran Kampung Akuarium, serta menggunakan Laporan Kampung Prioritas – Penyusunan Penyusunan *Community Action Plan* (CAP) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kelurahan Penjaringan di Jakarta Utara 2018 terkait gambaran umum dan demografi Kampung Akuarium sebelum dan sesudah penggusuran.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian deskriptif kualitatif memiliki beberapa langkah dalam melakukan teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana dengan langkah-langkah sebagai berikut (Wanto, 2017):

1. Kondensasi data, dapat diartikan sebagai proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Pada tahap ini, secara singkat peneliti menyeleksi, memilih data dan memfokuskan pada hal-hal pokok yang dirasa penting. Sehingga, dapat mempermudah peneliti memproses data yang sudah didapatkan. Data tersebut kemudian dirangkum serta disederhanakan sesuai dengan konteks penelitian yakni yang berkaitan dengan adanya proses serta strategi penolakan relokasi inisiator warga Kampung Akuarium. Pada tahap ini, peneliti memilih data penting dari transkrip data yang telah dilakukan.
2. Penyajian data, setelah melakukan kondensasi data, maka langkah selanjutnya yakni menyajikan data. Melalui langkah penyajian data, maka data yang didapatkan terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan. Pada langkah ini, peneliti akan menyajikan data melalui penggunaan tabel yang berisikan transkrip data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti juga dapat mengelompokkan data yang berkaitan dengan analisis teori yang digunakan.

3. Penarikan kesimpulan/*verification*, menurut Miles dan Huberman kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2016, p. 252). Maka, pada tahap kesimpulan dapat diartikan sebagai hasil dari awal peneliti mengumpulkan data hingga tahap yang akhirnya dapat disimpulkan melalui keseluruhan data yang telah diperoleh peneliti. Pada tahap ini, dapat diketahui bahwa strategi penolakan relokasi yang dilakukan oleh para aktor tidak hanya dilakukan karena kemampuan yang dimiliki oleh para inisiator penolakan relokasi. Namun, hal tersebut juga karena adanya sumber daya berupa relasi dengan LSM.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Bachri, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yakni peneliti membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengujian kredibilitas dengan cara, membandingkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dengan hasil wawancara dengan informan di lapangan. Apabila ditemukan data yang

berbeda, maka peneliti dapat melakukan tinjauan kembali terhadap informan penelitian.



BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Permasalahan Penggusuran

Tahun 2016 menjadi tahun yang memiliki kenangan tersendiri bagi warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Tahun itu menjadi tahun saat peristiwa penggusuran perkampungan tersebut. Lebih tepatnya, penggusuran terjadi pada tanggal 11 April 2016. Penggusuran tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Pada saat itu, penggusuran dilakukan karena Kampung Akuarium dianggap tidak sesuai dengan peruntukan ruang kota sekaligus untuk revitalisasi cagar budaya (Sabrina, 2019).

Penggusuran Kampung Akuarium secara tidak langsung juga diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua. Dalam peraturan tersebut, penggusuran Kampung Akuarium pun tertulis sebagai revitalisasi kawasan kumuh untuk membuat kanal dan penyediaan ruang terbuka. Sebagai contoh, dalam bagian keenam, nomer empat, point c disebutkan bahwa memperkuat peran RTH sebagai penanda pada kawasan Taman Fatahillah, Stasiun Kota, Galangan Tembok, Sunda Kelapa, Pasar Ikan Museum Bahari (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2014). Melalui point tersebut, maka lokasi Kampung Akuarium yang berada di sekitar kawasan Pasar Ikan dan Museum Bahari secara tidak langsung akan terkena dampak dari peraturan gubernur tersebut. Berikut ini dilampirkan Peta Skenario Umum Penataan Struktur Kawasan Kota Tua:

proses pengusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dilakukan dengan tanpa adanya sosialisasi. Di sisi lain, proses pengusuran tersebut dilakukan hanya dengan memberikan surat peringatan selama beberapa hari sebelum pengusuran benar-benar dilakukan. Dalam hal ini informan 2 menyatakan bahwa:

“Ya kalo untuk dari pengusuran dari Pemerintah DKI itu bener-bener ga ada, apa ya, sosialisasi sih kalo menurut saya. Gaada sosialisasinya sama sekali. Jadi, dengan cepatnya dia dengan 11 hari, 7-3-1 itu dia bener-bener mengusur Kampung Akuarium itu. Jadi, bener-bener gaada himbuan atau apa. Surat peringatan itu saya kira bukan himbuan tapi emang bener mau digusur, kalo sosialisasi tuh jauh-jauh sebelum SP, kita udah dikabari, atau sebulan dua bulan dikabari, itu sosialisasi. Kalo surat peringatan menurut saya itu bukan sosialisasi tapi sudah peringatan untuk digusur, gitu. 7 hari, 3 hari, 1 hari itu 7-3-1” (Hasil Wawancara, 4 Oktober 2019).

Berikut adalah gambaran kejadian proses pengusuran Kampung Akuarium:

Tabel 1. Kronologi Pengusuran Kampung Akuarium

Waktu	Peristiwa
26-27 Maret 2016	Isu pengusuran mulai tersebar setelah peristiwa Kalijodo
30 Maret 2016	Surat Peringatan 1 (SP 1) diterima warga. Warga meminta adanya dialog
04 Maret 2016	Diadakan dialog di kantor kecamatan, keputusan yang diterima warga saat itu tidak akan ada penertiban
06 April 2016	Warga menerima SP 2, tindakan intimidatif mulai dilakukan serta

	pendirian posko pembongkaran dilakukan atas perintah gubernur
09 April 2016	Pemberian SP 3, tindakan intimidatif semakin gencar dilakukan, warga dipaksa mendaftarkan diri ke rusun
11 April 2016	Pembongkaran bangunan dilakukan, aparat dikerahkan dalam jumlah besar, unjuk rasa warga mencegah pembongkaran sia-sia

Sumber: *Design Kampung Susun Bahari Akuarium (RUJAK Center for Urban Studies, UPC, dan JRMK)*

Berdasarkan gambaran singkat dari tabel di atas, maka dalam hal ini proses penggusuran dan rekomendasi relokasi dari pemerintah untuk Kampung Akuarium berada pada waktu yang hampir bersamaan atau tidak berjauhan. Diketahui bahwa berawal dari adanya isu penggusuran, maka SP pun diterima oleh warga yang kemudian warga meminta untuk diadakannya dialog di kecamatan. Seiring berjalannya waktu, warga pun dipaksa untuk mendaftarkan diri ke rusun. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua warga bersedia untuk direlokasi ke rusun yang kemudian memicu adanya warga yang melakukan penolakan relokasi. Sayangnya, pada tanggal 11 April penggusuran Kampung Akuarium tetap dilakukan dan menghancurkan seluruh hunian warga di Kampung Akuarium. Dalam penelitian ini, peneliti juga lebih memfokuskan peristiwa penolakan relokasi yang dilakukan oleh warga.

Dalam hal ini, penggusuran Kampung Akuarium tentu menimbulkan pro dan kontra. Pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta

mengatakan bahwa Kampung Akuarium masuk dalam zona merah atau zona pemerintah daerah untuk kawasan pemugaran Kota Tua/Sunda Kelapa (Heryanto, 2019). Kawasan pemugaran tersebut juga diartikan bahwa kawasan tersebut dapat dibangun rumah susun umum, asrama, rumah dinas, rumah ibadah, dan lain sebagainya (Heryanto, 2019).

Mengenai permasalahan zona di Kampung Akuarium, Pengamat Perkotaan, Nirwono Joga mengungkapkan pendapatnya terkait zonasi tersebut.

Baginya, pembangunan rumah lapis di kawasan gusuran Kampung Akuarium dianggap melanggar tata ruang karena berada pada ruang hijau (Fatah, 2019).

Di sisi lain, melalui hasil wawancara informan 3 menyatakan bahwa:

“RUJAK sendiri juga memberi pemahaman bahwa kamu ga haram ada di situ. Bahwa di situ diperbolehkan adanya pemukiman, bahwa zona kalian bukan zona putih, biru, hijau gitu kan. Kalian diperbolehkan walaupun itu zonanya merah dan pemerintahan daerah itu ada rumah dan pemukiman gitu kan.” (Hasil Wawancara, 4 Oktober 2019)

Melalui pendampingan LSM RUJAK, maka diketahui bahwa Kampung Akuarium tergolong ke dalam zona merah (pink) yang masih dapat diakses oleh pemukiman. Oleh karena itu, hal tersebut dipahami sebagai dasar bahwa seharusnya keberadaan Kampung Akuarium tidak digusur oleh Pemprov DKI Jakarta. Adanya hal tersebut juga semakin memperkuat alasan warga untuk tetap bertahan di Kampung Akuarium pasca penggusuran dan menolak untuk direlokasi ke rusunawa. Di bawah ini adalah peta zonasi Kampung Akuarium.



Gambar 2. Peta Kampung Aquarium dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi

Sumber: Dokumentasi rujak.org (RUJAK, 2018)

Penggusuran kampung yang melanda Kampung Aquarium juga dialami oleh 193 titik penggusuran lainnya di seluruh wilayah DKI Jakarta. Secara khusus, wilayah Jakarta Utara yang menjadi lokasi Kampung Aquarium juga memiliki 35 titik penggusuran lainnya. Dalam penggusuran Kampung Aquarium pada tanggal 11 April 2016 juga tidak terlepas dari peran aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Kehadiran aparat gabungan tersebut berjumlah kurang lebih 4000 aparat (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2017). Selain melibatkan aparat gabungan, proses penggusuran Kampung Aquarium juga melibatkan alat berat berupa excavator. Dalam hal ini, informan 4 mengungkapkan:

“Itu Beko yang kerukan itu, excavator itu. Nah disitu udah banyak, disitu ada 3 pilar, kata saya ini pemerintah mau perang sama siapa ya sampe 3 pilar ditaro, sampe ada anjing pelacak segala macam, udah kayak gembong narkoba, udah kayak teroris yang mau dikepung tuh pikiran saya itu mah disitu. Sesampainya pagi itu, kita istighosah tapi tetep digusur...” (Hasil Wawancara, 16 Agustus 2019)

Warga Kampung Akuarium yang mengalami penggusuran pun akhirnya tersebar ke beberapa wilayah. Kemudian, seminggu pasca penggusuran terdapat beberapa warga yang mengungsi di aula Masjid Luar Batang selama kurang lebih satu bulan. Sementara itu, terdapat warga lainnya yang menetap di sekitar lokasi penggusuran. Setelah beberapa warga memilih untuk mengungsi di aula Masjid Luar Batang, beberapa warga Kampung Akuarium berusaha untuk bertahan di lahan bekas penggusuran dengan menggunakan tenda di lahan bekas musholla. Selama kurang lebih satu bulan, warga bertahan di Kampung Akuarium dengan berada di tenda. Setelah membuat tenda sementara atau tiga bulan pasca penggusuran, warga yang bertahan juga membuat tempat tinggal sementara berupa bedeng-bedeng.

Setelah melakukan kebijakan berupa proses penggusuran Kampung Akuarium, Pemprov DKI Jakarta pun memberikan pilihan relokasi berupa rusunawa. Pilihan rusunawa yang diberikan oleh pemerintah diantaranya berada di Rusun Marunda, Cakung, dan Rawa Bebek. Jika diukur secara jarak, maka jarak dari Kampung Akuarium ke Rusunawa Marunda adalah 21 km. Sementara itu, untuk mencapai Rusunawa Cakung dibutuhkan jarak sekitar 22 km dari Kampung Akuarium. Sedangkan Rusunawa Rawa Bebek berjarak sekitar 27 km dari Kampung Akuarium. Cukup jauhnya jarak Kampung Akuarium ke Rusun Cakung dan Rawa Bebek juga disebabkan letak kedua rusun tersebut yang berada di daerah Jakarta Timur. Oleh karena itu, kondisi keberadaan rusunawa yang cukup jauh menyebabkan banyaknya warga Kampung Akuarium yang menolak untuk direlokasi.

4.2 Gambaran Umum Kampung Akuarium

Kampung Akuarium berada di Jl. Pasar Ikan, Kampung Akuarium RT.

012/RW. 04 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebelum mengalami penggusuran, Kampung Akuarium memiliki 2 RT yakni

RT. 001 dan RT. 012. Namun, pasca penggusuran, Kampung Akuarium hanya

memiliki 1 RT yakni RT. 012. Sementara itu, Kampung Akuarium memiliki

luas wilayah sebesar 10.183 m² atau sekitar 1,02 ha. Berikut dilampirkan data

demografi Kampung Akuarium sebelum dan sesudah adanya penggusuran:

Tabel 2. Data Demografi Sebelum-Sesudah Penggusuran

Keterangan	Sebelum Penggusuran	Sesudah Penggusuran
Jumlah Penduduk	750 Jiwa	210 Jiwa
Jumlah KK	170 KK	85 KK
Jumlah Bangunan	91 Unit	241 Unit
Kepadatan Penduduk	1 Jiwa/ m ²	1 Jiwa/ m ²

Sumber: Laporan Kampung Prioritas - Penyusunan Community Action Plan

(CAP) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kelurahan Penjaringan di

Jakarta Utara (Anonim, 2018)

Namun, terdapat kejanggalan pada data sekunder yang didapatkan di

atas. Pada tabel keterangan jumlah bangunan, jumlah bangunan justru

mengalami peningkatan saat sesudah penggusuran. Hal tersebut menjadi

perbedaan tersendiri dibandingkan jumlah keterangan lainnya pada tabel

tersebut yang mengalami penurunan. Berdasarkan asumsi peneliti, kejanggalan

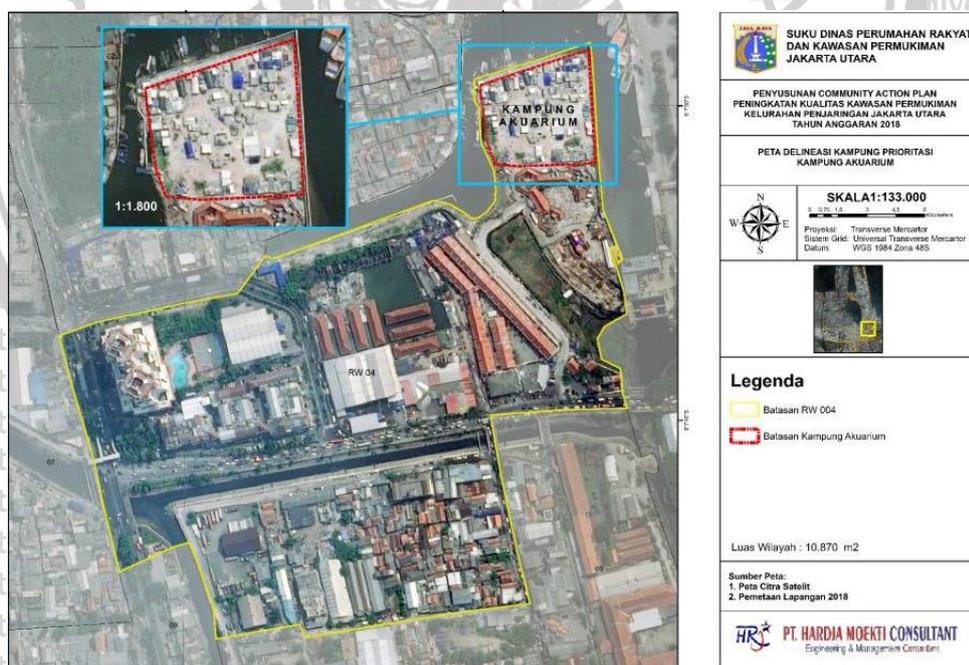
tersebut dapat diakibatkan karena adanya kesalahan penulisan (*typo*). Hal ini

dikarenakan jumlah bangunan sesudah penggusuran berjumlah 90 bangunan

sesuai dengan jumlah *shelter* yang ada di Kampung Akuarium.

Pada sisi mata pencaharian, pekerjaan warga Kampung Akuarium memiliki pekerjaan yang beragam. Sebelum mengalami penggusuran, warga memiliki pekerjaan seperti usaha toko kelontong, kontrakan, nelayan, dan pengrajin kayu. Sementara itu, setelah digusur mayoritas warga bekerja sebagai nelayan, buruh dan kuli angkut pelelangan ikan, usaha toko kelontong dan gas LPG, karyawan swasta, dan jasa pengemudi (*driver*). Sementara itu, Kampung Akuarium terletak di antara batas wilayah sebagai berikut:

- Batas Timur: Pelabuhan Sunda Kelapa.
- Batas Barat: Kampung Luar Batang.
- Batas Utara: Teluk Jakarta dan Laut Jawa
- Batas Selatan: Pasar Hexagon (Pasar Ikan) serta Museum Bahari.



Gambar 3. Peta Kampung Akuarium

Sumber: Laporan Kampung Prioritas - Penyusunan Community

Action Plan (CAP) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kelurahan

Penjaringan di Jakarta Utara (Anonim, 2018)

Dua tahun pasca penggusuran, Kampung Akuarium pun memiliki *shelter* yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Anies Baswedan di tahun 2018. *Shelter* yang berada di Kampung Akuarium berjumlah 90 *shelter*. *Shelter* dibagi atas 3 blok dengan rincian sebagai berikut: Blok A berjumlah 38 *shelter*, Blok B berjumlah 26 *shelter*, Blok C berjumlah 24 *shelter*, 1 *shelter* untuk PAUD, dan 1 *shelter* untuk koperasi. Proses pembangunan *shelter* dilakukan pada tahun 2018, dimana masing-masing bangunan *shelter* memiliki luas sebesar 3,5x6 m². Keberadaan masing-masing *shelter* juga dilengkapi dengan kamar mandi bersama yang terletak pada masing-masing blok *shelter*.

4.3 Sejarah Kampung Akuarium

Sejarah Kampung Akuarium berawal sejak 10 Januari 1898. Seperti halnya yang dikatakan oleh laman Oseanografi² LIPI, saat itu adalah awal mula terbentuknya Kampung Akuarium. Pada saat itu, Dr. J. C. Koningsberger menjadi kelapa laboratorim Zoologi Pertanian bagian dari Kebun Raya Bogor pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda (Sabrina, 2019). Pada masa itu, perhatian Koningsberger juga berfokus pada fauna laut. Pada September 1904, ia pun menemukan lokasi yang cocok untuk mendirikan laboratorim di Teluk

² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, oseanografi merupakan ilmu tentang segala aspek yang berhubungan dengan laut dan lautan (seperti tumbuhan, binatang laut); oseanologi.

Jakarta. Lokasi tersebut berada di sebelah utara Pasar Ikan, bagian paling selatan Oude Haven atau yang sekarang dikenal dengan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Pada tahun 1904 proses pembangunan laboratorium itu pun dimulai dan selesai pada Desember 1905. Laboratorium tersebut adalah gedung semi-permanen yang disebut Visscherij Laboratorium te Batvia atau Laboratorium Perikanan di Batavia (Sabrina, 2019). Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 1922 juga dibangun laboratorium baru yang lebih permanen dan gedung akuarium air laut yang besar. Akuarium tersebut dibuka untuk umum di tahun 1923. Pada akhirnya, hingga tahun 1960-an, akuarium tersebut dikenal dengan Akuarium Pasar Ikan yang menjadi daya tarik wisata di Jakarta.

Berdasarkan informasi lain yang didapatkan melalui akun instagram @rujakrcus, sejarah Kampung Akuarium berawal dari sejarah masa lalu dimana Kampung Akuarium menjadi pusat kantor penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di bidang oseanografi. Pada tahun 1940-1970an terdapat kantor, fasilitas penelitian air laut dan akuarium satwa laut yang dibuka untuk umum.

Pada perkembangannya, pada tahun 1970-an Pemerintah DKI Jakarta menutup kawasan dan akuarium di Pasar Ikan karena adanya perencanaan pengembangan perluasan kawasan Museum Bahari. Kemudian, laboratorium kelautan dipindahkan ke Ancol yang sekarang menjadi Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Pembangunan di Pasar Ikan pun menjadi terkatung-katung.

Pada akhirnya, seiring dengan waktu yang berjalan, lahan tersebut berpindah

kepemilikan ke tangan warga melalui perjanjian jual beli dengan pihak pengelola dan menjadi awal terbentuknya perkampungan warga.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa Kampung Akuarium telah dihuni menjadi perkampungan sejak puluhan tahun silam. Beberapa informan juga menyebutkan bahwa orang tua dan kakek mereka telah berada di Kampung Akuarium dimulai dari tahun 1965-1970 an. Sehingga, keberadaan warga di Kampung Akuarium disebabkan karena warga dilahirkan di sana serta meneruskan anggota keluarga yang sudah lebih dahulu berada di sana. Hal itulah yang membuat rasionalitas warga untuk menolak direlokasi karena adanya sejarah tempat tinggal yang sudah dimiliki sejak dahulu. Kemudian, hal ini juga yang kemudian berkaitan dengan faktor ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat di Kampung Akuarium.

4.4 Profil Informan

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah tokoh masyarakat serta warga Kampung Akuarium yang telah menetap lama serta terlibat langsung dalam proses penolakan relokasi yang terjadi di Kampung Akuarium.

Berikut merupakan profil informan yang dipilih:

1. Informan 1

Informan 1 adalah salah satu tokoh masyarakat di Kampung Akuarium. Informan yang berumur hampir 60 tahun dan memiliki empat orang anak ini adalah salah satu warga yang melakukan penolakan dari perwakilan warga sebagai pemilik rumah di Kampung Akuarium. Saat mengalami penggusuran, informan 1 mengungkapkan bahwa hal tersebut

bertepatan dengan kelulusan SMK kedua anak informan 1. Sementara itu, satu anak lainnya masih ingin melakukan pendaftaran sekolah dari SMP ke SMK.

Informan 1 telah tinggal di Kampung Akuarium sejak tahun 1986. Ia juga termasuk dalam generasi ke-3 di dalam keluarganya yang tinggal di Kampung Akuarium. Pada kesehariannya, informan 1 bekerja sebagai *freelance*. Informan 1 menjadi salah satu masyarakat yang berperan penting dalam penolakan relokasi Kampung Akuarium. Hal ini disebabkan karena informan 1 menjadi salah satu orang yang menghubungi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis yang dapat membantu masyarakat bertahan dalam proses penolakan inisiator warga Kampung Akuarium.

2. Informan 2

Informan 2 adalah salah satu warga yang menjadi generasi ketiga yang telah tinggal di Kampung Akuarium setelah kakek dan orang tuanya. Dalam hal ini informan 2 juga termasuk warga pendatang. Ia berasal dari Sumatera Barat. Keberadaannya di Kampung Akuarium mengikuti jejak orang tuanya yang sudah tinggal di Kampung Akuarium semenjak tahun 1970-an. Hingga saat ini, informan 2 pun tinggal di Kampung Akuarium bersama orang tuanya.

Informan 2 juga menjadi salah satu perwakilan dari warga pengontrak rumah yang menolak relokasi Kampung Akuarium. Dalam melakukan penolakan relokasi, informan 2 melakukan pencarian informasi publik kepada jaringan seperti aktivis dan lembaga-lembaga. Selain itu, informan 2 juga menjadi salah satu warga yang memiliki “jabatan

kepentingan” di Kampung Akuarium. Melalui sumber daya tersebut, informan 2 memiliki kedekatan lebih dengan pihak pemerintahan dan dapat meningkatkan solidaritas warga Kampung Akuarium dalam melakukan proses penolakan relokasi.

3. Informan 3

Informan 3 menjadi salah satu warga yang lahir di Kampung Akuarium. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah tinggal di Kampung Akuarium sejak tahun 1976. Dalam proses penolakan Kampung Akuarium, informan 3 berperan sebagai koordinator inisiator dalam penolakan relokasi. Dalam kesehariannya, pasca penggusuran informan 3 bekerja sebagai ibu rumah tangga dan berdagang gas. Sebelum penggusuran, ia memiliki usaha kontrakan dan berjualan sembako.

Informan 3 juga memiliki empat orang anak, 2 orang diantaranya berada pada bangku Sekolah Dasar (SD), 1 orang lulusan SMK, dan 1 orang bekerja sebagai perawat. Pasca penggusuran, informan 3 mengungkapkan bahwa ia sempat mengalami kesulitan untuk mengurus keperluan sekolah karena KTP nya yang sempat dibekukan sementara. Sebagai seseorang yang dapat dikatakan sebagai inisiator dalam penolakan relokasi Kampung Akuarium, informan 3 berperan dalam mencari *link* guna mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait penolakan relokasi tersebut. Dalam hasil wawancara, ia pun seringkali membagikan proses perkembangan penolakan relokasi Kampung Akuarium melalui akun sosial media pribadinya.

4. Informan 4

Informan 4 menjadi salah satu warga yang menjadi perwakilan pengontrak. Informan yang berasal dari Pemalang ini sudah tinggal di Kampung Akuarium selama 15 tahun. Informan 4 mengungkapkan bahwa keberadaannya di Kampung Akuarium berawal saat ibunya berjualan warteg saat ia masih kecil. Sejak saat itu dirinya sempat kembali ke Pemalang dan kembali lagi ke Kampung Akuarium saat sudah lulus sekolah.

Ia pun tinggal di Kampung Akuarim bersama suami dan anak-anaknya. Pasca penggusuran, informan 4 bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sebelum menjadi ibu rumah tangga, informan sempat bekerja sebagai koki di restaurant di daerah Pantai Indah Kapuk. Namun, karena adanya penggusuran pada waktu itu cukup menyita waktu, akhirnya informan 4 pun tidak dapat melanjutkan pekerjaannya sebagai koki. Informan 4 adalah salah satu informan yang memiliki kesadaran sehingga bersedia untuk menjadi salah satu inisiator penolakan relokasi. Dalam konteks proses penolakan relokasi, informan 4 awalnya diajak oleh informan 3 sebagai warga yang menolak relokasi dari perwakilan pengontrak. Ia pun setuju untuk bergabung dengan informan lainnya. Informan 4 juga mengungkapkan bahwa dirinya terlibat langsung dalam aksi penolakan relokasi, seperti melakukan gugatan pengadilan, demo, dan membantu memberikan kesadaran bagi warga lainnya untuk melakukan penolakan relokasi.

4.5 Gambaran Umum Aktor

Berdasarkan profil informan yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian ini informan tersebut adalah inisiator warga Kampung Akuarium yang melakukan penolakan relokasi. Inisiator ini adalah warga yang bergerak aktif dalam melakukan relokasi. Aktif di sini berarti bahwa informan tersebut bergerak langsung untuk mewakili warga Kampung Akuarium dalam melakukan penolakan relokasi. Hal ini juga bukan berarti hanya para informan yang menolak relokasi, namun mereka menjadi pihak perwakilan warga Kampung Akuarium yang bergerak langsung. Sehingga, apabila ada suatu perkembangan terkait dengan Kampung Akuarium pasca penggusuran, maka para informan ini yang akan menyampaikan kepada warga lainnya.

Jika dilihat berdasarkan teori pilihan rasional, maka para informan juga kemudian dikatakan sebagai aktor. Dimana mereka memiliki tujuan yang akan dicapai melalui tindakan berupa penolakan relokasi yang dilakukan. Mengingat, aktor dalam teori pilihan rasional adalah pelaku yang tidak sepenuhnya menguasai kegiatan yang dapat memenuhi kepentingannya, namun menyadari bahwa beberapa dari kegiatan itu sebagian atau sepenuhnya berada di bawah kuasa pelaku lain. Sehingga, menjadi penting bagi para aktor untuk bekerja sama dan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan mereka.

BAB V**PEMBAHASAN****5.1 Aktor dan Sumber Daya dalam Penolakan Relokasi**

Dalam teorinya, Coleman mengungkapkan bahwa peran aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud, dimana tujuan dan tindakan aktor tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu (Ritzer, 2014, p. 332). Pada penelitian ini, yang termasuk dalam aktor adalah inisiator warga Kampung Akuarium yang menolak direlokasi. Aktor berupa inisiator warga yang menolak relokasi memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut yakni untuk mengembalikan perkampungan Kampung Akuarium.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada strategi penolakan relokasi inisiator warga Kampung Akuarium. Dimana terdapat aktor dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sumber daya dipahami sebagai sesuatu yang menarik perhatian dan dapat dikontrol oleh aktor (Ritzer, 2014, p. 369). Coleman dalam teorinya mengungkapkan bahwa sumber daya adalah hal-hal yang dikendalikan oleh para aktor dan mereka berkepentingan padanya (Ritzer, 2012, p. 760). Sehingga, sumber daya yang dimiliki oleh aktor dapat menarik perhatian pihak lainnya dan dapat membentuk tindakan yang saling membutuhkan.

Adanya interaksi antara aktor dan sumber daya itu juga dapat mendorong ke arah level sistem. Melalui keberadaan sumber daya, para aktor memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Dalam teori pilihan

rasional. Coleman, aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun dapat memuaskan kebutuhan aktor (Ritzer, 2014, p. 369).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Coleman, bahwa hubungan antara pelaku (aktor) dan sumber merupakan hubungan antara kuasa dan kepentingan (Coleman, 2011, p. 37). Dalam penelitian ini, para aktor yakni inisiator warga yang menolak direlokasi memiliki sumber daya yang sifatnya internal juga eksternal berupa relasi dengan LSM. Melalui sumber daya ini, aktor dapat mencapai tujuannya melalui sumber daya yang dimiliki. Sumber daya lainnya yang dimiliki oleh aktor yakni solidaritas warga Kampung Akuarium. Melalui kepemilikan sumber daya ini, aktor dapat bertahan dan menolak untuk direlokasi.

Dapat dikatakan bahwa aktor yang terlibat sebagai inisiator penolakan relokasi terdiri dari beberapa warga yang aktif melakukan penolakan relokasi. Pada kasus Kampung Akuarium sendiri, terdapat salah satu aktor yang berperan sebagai koordinator penolakan relokasi. Peran informan 3 sebagai koordinator penolakan relokasi berasal dari kesadaran dalam dirinya untuk bergerak dalam penolakan relokasi. Dalam hal ini, informan 3 juga menjadi perwakilan pemilik rumah yang menolak direlokasi. Ia pun pernah menjabat sebagai mantan ketua RT yang merupakan sebuah sumber daya untuk melakukan penolakan relokasi. Dalam proses wawancara, diakui bahwa informan 3 adalah informan yang dapat memberikan data lebih lengkap dan rinci dibandingkan dengan informan lainnya.

Selanjutnya, peran informan 3 yang berperan sebagai koordinator penolakan relokasi juga diungkapkan oleh informan lainnya. Hal ini dinyatakan oleh pernyataan informan 2:

“Bu informan 3 kan jadi koordinator, dia korwil dia, kalo di tim CAP itu informan 3 korwil. *Community Action Plan* yang sama gubernur itu lho. Di bulan Januari 2017, eh 2018 Desember/Januari. Ya informan 3 jadi korwilnya di sini...” (Hasil wawancara, 4 Oktober 2019)

Selain itu, diketahui bahwa informan 3 juga pernah menjabat sebagai mantan ketua RT. Hal tersebut menyebabkan informan 3 memiliki relasi dengan pihak pemerintah seperti kelurahan dan kecamatan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya dalam proses penolakan relokasi. Dengan adanya sumber daya yang dimiliki tersebut, informan 3 dapat mencapai tujuan penolakan relokasi dengan lebih mudah. Mengingat, jabatan sebagai mantan ketua RT menyebabkan informan 3 sudah lebih dikenal oleh pihak pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sumber daya ini pun dimanfaatkan informan 3 pada saat pasca pengusuran, pihak kelurahan menawarkan informan 3 untuk memeriksa kondisi rusunawa.

“... Di setiap konflik, di setiap daerah konflik pasti ada konflik internal. Nah di konflik internalnya saya adalah pihak yang paling tersudut. Kebetulan saya juga mantan pengurus kan di sini, ibaratnya udah ada pernah jabatan-jabatan RT lah, suami juga LMK, mantan wakil RW segala macam. Jadi kedekatan ke kelurahan kecamatan tuh udah biasa banget...” (Informan 3, hasil wawancara 4 Oktober 2019)

Peran informan 3 sebagai koordinator juga dilakukan dengan senantiasa mengajak tim kerja dan warga Kampung Akuarium lainnya dalam menjaga solidaritas warga kampung ketika bertahan menolak relokasi. Tim kerja sendiri terdiri atas beberapa warga yang sejak awal bertahan di Kampung Akuarium

dan menolak direlokasi. Informan 4 mengungkapkan bahwa tim kerja terdiri dari kurang lebih 10 orang warga Kampung Akuarium. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan 2:

“Kalo tim kerja kita ada, kayak tadi Mas O di sini juga sebagai dari yang kerja-kerja dokumen kita, terus ada J, ini juga termasuk tim kerja dari tim dapur atau bagian dapur nanti ada tamu di rumah mereka. Ya pokoknya sekitar, ya ada lah puluhan orang juga yang ada mendukung.” (Hasil wawancara, 4 Oktober 2019)

Dalam hal ini, tim kerja dapat dipahami sebagai beberapa warga Kampung Akuarium yang sudah memiliki pembagian tugas masing-masing dalam membantu para inisiator penolakan relokasi Kampung Akuarium.

Melalui hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa terbentuknya tim kerja adalah bentuk dari sebuah tindakan efektif yang dibentuk atas kesepakatan para aktor. Tindakan semacam ini adalah tindakan yang oleh Coleman disebut sebagai tindakan purposif atau bertujuan, sama seperti yang digunakan dalam penelitian Weber. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan 3 pada saat proses wawancara:

“... saat kami sudah melakukan deal politiknya dengan Pak Gubernur, ada program yang disetujui dengan CAP itu kan. Di CAP itu dibutuhkan tim kerja walaupun sebenarnya informal karna hanya ada di kampung aja. Secara umum, kami tidak diakui, mana ada di kampung-kampung lain tim kerja, tapi di 16 kampung yang jadi kampung-kampungnya JRMK itu, kami buat kesepakatan, ada koordinator, ada tim kerja. Saya sebagai koordinatornya, ada siapa-siapa warga yang bisa untuk jadi tim kerja nih. Kayak M, kayak A. C, Ibu K, Ibu L itu bagian dari tim kerja. Mereka yang akan bantu di lapangan. Mereka yang akan bantu untuk sama-sama menyambung lidah.” (Hasil wawancara, 4 Oktober 2019)

Selain informan 3, terdapat aktor lainnya yakni, informan 1, informan 2, dan informan 4 yang juga tergabung dalam tim kerja untuk melakukan proses penolakan relokasi. Hubungan antar aktor semacam ini menegaskan bahwa

aktor tidak sepenuhnya menguasai kegiatan yang dapat memenuhi kepentingannya, namun menyadari bahwa beberapa dari kegiatan itu sebagian atau sepenuhnya dikuasai oleh aktor lainnya (Coleman, 2011, pp. 37-38).

Informan 1 di sini adalah seorang tokoh masyarakat yang juga mewakili pihak pemilik rumah yang menolak untuk direlokasi. Keterlibatan informan 1 dalam proses penolakan relokasi dilakukan karena kesadaran dirinya sendiri. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya warga yang dapat difigurkan untuk maju/dipercaya dapat melakukan penolakan relokasi. Akhirnya, informan 1 dan informan 3 melakukan proses penolakan secara bersamaan.

Pada hasil wawancara, melalui informan 1, diketahui pula bahwa keterlibatan para aktor dalam melakukan penolakan relokasi disebabkan karena adanya kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Hal ini pun berkaitan dengan adanya tingkat keberanian, ekonomi, dan waktu yang dimiliki para aktor. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk melakukan strategi penolakan relokasi dibutuhkan kemampuan-kemampuan tersebut.

Kemudian, informan 2 juga memiliki kesadaran untuk melakukan proses penolakan relokasi Kampung Akuarium:

“... Iya.. sebelum digusur. Jadi saya aktif di depan. Jadi, di depan itu bagaimana langkah-langkahnya saya kumpulin kayak tokoh masyarakat, RT nya, bagaimana kita urun rembuk dan ternyata di RT 12 itu ada urun rembuk juga, ada Bu informan 3, Ada Pak informan 1, dan itu emang sudah digariskan. Ketika saya berangkat ke LBH dengan kawan-kawan RT 1 dan itu ternyata informan 1 juga sama dan hari itu pula dan kita ga ada janji. Jadi sama-sama kaget, “Lho lu kemari?” “Iya disuruh kemari, ada dapet contact ini” “Gue juga iya” gitu, kayak udah ada hati tapi di waktu yang sama padahal gaada janji. Informan 1 duluan, ga lama saya, dua mobil. Informan 1 pake motor, duluan mereka, emang duluan informan 1

gitu, kayak emang ada hati gitu disatukan di sana...” (Hasil wawancara, 4 Oktober 2019)

Adanya rasa optimis, percaya diri, dan dukungan dari keluarga, warga, dan teman-teman di lingkungannya juga menjadikan informan 2 berperan dalam proses penolakan relokasi. Bersama dengan informan 3, di Kampung Akuarium informan 2 juga memegang jabatan kepentingan di tingkat RT. Hal tersebut menunjukkan sumber daya yang dimiliki oleh informan 2. Melalui jabatan yang dimilikinya, maka terdapat relasi dengan birokrasi pemerintahan di tingkat kelurahan maupun kecamatan yang semakin mendukung informan 2 sebagai aktor untuk melakukan penolakan relokasi.

Adanya sumber daya berupa relasi dengan pihak birokrasi pemerintahan juga dimanfaatkan informan 2 tidak hanya untuk melakukan penolakan relokasi, namun juga untuk mengembalikan KTP warga yang sempat dibekukan saat terjadinya pengusuran kampung. Sebelum mengembalikan KTP yang sempat dibekukan, peran dirinya juga berkaitan dengan keperluan administrasi warga yang ingin ke rumah sakit, sekolah, dan sebagainya.

Aktor lainnya yang menjadi inisiator dalam proses penolakan relokasi adalah informan 4. Informan 4 menjadi perwakilan dari warga yang mengontrak di Kampung Akuarium. Adanya kesadaran dalam dirinya menjadikan informan 4 bergerak untuk melakukan penolakan relokasi. Selain kesadaran, informan 4 juga didukung oleh dorongan informan 3 yang mempercayai dirinya untuk terlibat dalam proses penolakan relokasi. Dalam hasil wawancara, informan 4 mengungkapkan:

“... Kesadaran, karena saya gini loh, ih ini kan Indonesia ya udah merdeka masa rakyatnya cuma ditelantarin begitu doang, gitu. Jadi memang kesadaran diri sendiri aja gitu. Kan kalo di kampung ini gaada yang berani siapa lagi kalo bukan kita sendiri gitu...” (Hasil wawancara, 16 Agustus 2019)

Dalam prosesnya, penolakan relokasi yang dilakukan oleh para aktor juga dilakukan dengan dukungan solidaritas warga. Informan 4 mengungkapkan bahwa awalnya solidaritas warga dalam menolak relokasi tidak langsung terbentuk begitu saja. Pada saat itu, para aktor inisiator warga Kampung Akuarium bekerja keras dalam membangun kesadaran warga yang masih bertahan di Kampung Akuarium.

“Ya itu ada, pokoknya kayak ke pengadilan.. tadinya mah “apaansih pengadilan orang gila gitu?” pokoknya ada. Terus kita kan ikut demo kan, mentung-mentung panci segala macam, pokoknya yang ga seneng ya “ih ngapain pemerintah dilawan, ga mungkin pemerintah dilawan itu bisa” katanya begitu, tapi kita selalu berpikir gini “pemerintah aja gabisa nunjukin ini tanah siapa, sama kayak kita. Kan ini statusnya punya LIPI kan dulunya dan pemerintah pun sampai saat ini pun belum bisa nunjukin, nah kita pun sama, gitu. Jadi ya bareng-bareng aja gitu, ya sempet susah juga, tapi ada juga beberapa warga yang iya ikut, tapi dulu mah banyakan emak-emak. Kita demo juga emak-emak kemana-mana emak-emak...” (Hasil wawancara, 16 Agustus 2019)

Guna membangun solidaritas warga Kampung Akuarium dalam melakukan penolakan relokasi, hal tersebut dilakukan juga dengan diadakannya pertemuan rutin untuk membahas progress penolakan relokasi.

Pertemuan rutin tersebut dijadwalkan secara kondisional ketika dibutuhkan untuk warga berkumpul. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan 2:

“Biasanya kalo untuk keseluruhan warga itu biasanya setelah habis rapat besar dengan gubernur, pemberitahuan yang mungkin untuk kesenangan warga atau bener-bener apa yang harus diproses, mungkin itu. Contoh kemarin, yuk kita rapat bareng, dokumen ini yang harus kita kumpulkan, dan wajib dan tiga hari atau sehari jadi, itu harus kumpul warga semua. Atau design, design gambar, yang

disetujui ‘bagaimana warga?’ nah itu jadi ngga ada waktunya sih sebenarnya. Ketika diperlukan misalnya ayo kumpulin semua berkas-berkas, warga dikumpulin dulu, pemberitahuan yang diluar-luar daripada *shelter*, pemberitahuan ke anak yang di kampung segala macam, gitu sih. Jadi ga terjadwal sebulan sekali, seminggu sekali, engga, tapi ketika ada bener-bener waktu atau kegiatan yang diperlukan untuk warga sekitar mendengar dibicarakan atau pasca kita rapat besar dengan Pak Gubernur atau dari pihak Dinas Perumahan, apa aja yang harus dikumpulkan, itu mungkin.” (Hasil wawancara, 4 Oktober 2019)

Sementara itu, informan 3 mengungkapkan bahwa pertemuan rutin/rapat antar warga diusahakan untuk dilakukan setiap minggu. Informasi untuk kumpul rapat itupun disebarluaskan melalui aplikasi mengirim pesan *Whatsapp* ataupun datang ke rusun-rusun yang masih ditempati oleh warga.

Membangun solidaritas warga menjadi penting karena para aktor di sini tidak hanya memperjuangkan kepentingannya sebagai individu saja, namun kepentingan untuk dapat mengembalikan keberadaan Kampung Akuarium. Oleh karena itu, dukungan dan solidaritas warga dibutuhkan walaupun solidaritas tersebut baru ditingkatkan seiring dengan berjalannya proses penolakan relokasi.

“Iya sih kalo pertemuan kita usahain setiap minggu bikin pertemuan. Tadinya sih cuma kumpul-kumpul aja buat curhat-curhatan. Atau bikin ini bikin belajar bahasa inggris diajarin sama salah satu arsitek kita gitu kan cuma ngisi luang doang. Dari situ kita ngobrol, kalo misalnya ini boleh bisa kita ajuin atau kita boleh bangun gitu ya, kira-kira siap ga misal rumahnya ditata tapi ga seperti dulu lagi? Ga masing-masing. Tadinya mah sempet pada keberatan, maunya kan rumah masing-masing, tapi kita kan udah dapet informasi dari ini ini ini. Kalo misalnya rumahnya seperti dulu lagi, ancaman penggusurannya bisa ada lagi. Mungkin yang mau dihilangkan adalah kekumuhannya. Terus kalo misalnya ini cuma dibikin hunian doang, nilai historisnya ga ada. Sesuatu yang ditinggal di kampung ini tuh ga ada. Jadi bagaimana kita mau siap ditata tapi kita tetep bisa kembali lagi di sini dan ada jaminan kan untuk tinggal di sini. Itu juga sebenarnya sulit banget, itu juga sulit ngasih pemahaman begitu...” (Hasil wawancara, 4 Oktober 2019)

Informan 4 juga mengungkapkan bahwa ia juga mengikuti diskusi publik yang akhirnya mengenalkannya pada LSM yang mendampingi warga Kampung Akuarium dalam proses melakukan penolakan relokasi. Namun, terdapat perbedaan pandangan dari informan terkait terbentuknya relasi para aktor dengan LSM. Di sisi lain, informan 3 mengatakan bahwa adanya pendampingan dari pihak LSM adalah inisiatif dari pihak LSM itu sendiri untuk mendampingi Kampung Akuarium. Ketika ditelusuri, ternyata LSM yang mendampingi para aktor di Kampung Akuarium juga mendampingi beberapa perkampungan prioritas lainnya di Kelurahan Penjaringan. Terlepas dari perbedaan sudut pandang tersebut, adanya proses pendampingan dari LSM inilah yang menjadikan sumber daya bagi inisiator warga Kampung Akuarium yang menolak direlokasi.

“Nah udah tuh akhirnya saya ketemu sama mahasiswa dari UI, nah udah tuh, dia ibu-ibu sih dateng ke sini, sendiri. Nah saya di situ dibawalah dikenalin.. dibawalah eh ada diskusi publik loh di LBH Jakarta. Oh iya, terus kan dibawa ke RUJAK, eh mana LBH Jakarta, nah di situ ada diskusi publik tentang penggusuran paksa tuh dan narasumbernya itu orang dari JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta yang biasanya damping-dampingin kampung. Nah terus disitu saya kenalan tuh sama Ibu Eni Rohayati namanya. Nah dari Bu Eni Rohayati dikenalin sama Gugun, Gugun UPC. Waktu itu masih apa ya, ulang tahun ke KAKC, Komunitas Anak Kali Ciliwung. Nah dari situ dikenalinlah ke RUJAK, RUJAK lagi, RUJAK Center itu. Akhirnya jalan jalan jalan terus, pokoknya ini nah akhirnya kita dikasih, saya selalu nanya gimana ya dengan cara kita bertahan tanpa dibayang-bayangin sama Satpol PP, digusur lagi gitu kan... Dari situ lah kita mulai kenal sama yang namanya apa hukum, segala macem, tentang zonasi, tentang RDTR, itu dari RUJAK Center, dari UPC, dan JRMK, pokoknya yang damping-dampingin kita lah gitu...” (Informan 4, hasil wawancara 16 Agustus 2019)

Selain menjadi pendamping, adanya relasi yang terjalin antara para aktor dengan LSM juga dilakukan dengan adanya pengorganisasian terhadap

warga. Pengorganisasian tersebut yakni digambarkan melalui strategi bertahan warga pasca terjadinya penggusuran. Pengorganisasian ini juga dilakukan LSM melalui adanya kegiatan rapat rutin yang dilakukan oleh warga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

“... Dari bantuan tenda, dari bantuan hukum, LBH Jakarta kan, dari pendampingan dari RUJAK, JRMK pengorganisasian. Nah, saya sih sebenarnya yang berpikir oh ini kesempatan langka gitu lho. Iya gila aja gitu kan ya ibaratnya kita udah kegusur lewat peraturan, kan gitu kan, terus kita ibaratnya mau berusaha lagi tapi pake peraturan juga gitu kan dan pendamping-pendamping ini tuh bukan orang-orang yang sekedar ‘ho ho ho’ gitu kan tapi memang ada kasih solusi-solusi...” (Informan 3, hasil wawancara, 4 Oktober 2019)

Adanya keterlibatan sumber daya eksternal berupa relasi dengan LSM menjadikan para aktor inisiator warga Kampung Akuarium mengetahui strategi dan pengetahuan saat melakukan penolakan relokasi. Hal ini dapat diketahui melalui pengetahuan mengenai hukum, peruntukan tanah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta sistem zonasi di Kampung Akuarium yang diberikan oleh RUJAK. Kepentingan masing-masing terhadap sumber daya yang dikuasai oleh pihak lain adalah yang menjadikan keduanya sebagai pelaku purposif, terlibat dalam tindakan yang melibatkan satu sama lain (Coleman, 2011, p. 38).

Sehingga, hal tersebut menjadikan hubungan di antara aktor dan sumber daya menjadi saling terikat. Informan 3 juga menyatakan bahwa adanya relasi dengan LSM memberikan pemahaman dan penguatan bagi inisiator warga Kampung Akuarium dalam melakukan penolakan relokasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa keterlibatan para aktor dalam proses penolakan relokasi didasari oleh adanya kesadaran dalam diri aktor. Kesadaran itulah yang kemudian menjadikan para aktor sebagai

warga yang menjadi inisiator proses penolakan relokasi. Keterlibatan para aktor juga seolah saling melengkapi sumber daya satu sama lain guna mencapai tujuan mereka. Disebutkan bahwa melalui transaksi, atau interaksi sosial tersebut, orang mampu menggunakan sumber-sumber yang mereka kuasai namun kurang memiliki kepentingan bagi mereka untuk mewujudkan kepentingan yang ada di balik sumber-sumber yang dikuasai oleh pelaku-pelaku lain (Coleman, 2011, p. 38).

Sumber daya yang digunakan oleh aktor juga tidak hanya sumber daya yang sifatnya internal yang dimiliki oleh aktor, namun terdapat sumber daya eksternal melalui adanya relasi dengan LSM. Para aktor berusaha untuk menjalin relasi dengan LSM untuk mendampingi warga dalam melakukan proses penolakan relokasi. Sesuai dengan teori pilihan rasional, adanya relasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber daya bagi para inisiator penolakan relokasi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai yakni mengembalikan Kampung Akuarium. Dapat diketahui pula bahwa tindakan yang dilakukan para aktor dengan berelasi dengan berbagai LSM dipahami sebagai sebuah hal yang dapat memaksimalkan manfaat dan kebutuhan para aktor. Hal ini menunjukkan bahwa aktor tidak sepenuhnya menguasai kegiatan yang dapat memenuhi kepentingannya, namun menyadari bahwa beberapa dari kegiatan tersebut sebagian atau sepenuhnya berada di bawah kuasa pelaku lain (Coleman, 2011, p. 38).

Keberadaan aktor dan sumber daya adalah dua hal yang saling berkaitan. Dimana saat aktor berusaha untuk mencapai tujuannya, aktor pasti membutuhkan sumber daya yang dapat menunjang aktor untuk mencapai

tujuan tersebut. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa sumber daya dapat dikendalikan oleh aktor. Adanya sumber daya berbeda yang dimiliki masing-masing aktor juga menimbulkan tindakan saling membutuhkan antar aktor.

Dalam hal ini, sumber daya berupa adanya aktor yang pernah dan sedang menjabat sebagai pemegang kepentingan di tingkat RT, solidaritas warga, dan relasi dengan LSM menjadikan proses penolakan relokasi yang dilakukan oleh para aktor berpeluang mencapai tujuannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktor memiliki peran penting dalam proses penolakan relokasi Kampung Akuarium. Dalam hal ini, inisiator warga Kampung Akuarium adalah yang berperan sebagai aktor. Untuk mencapai tujuannya, para aktor senantiasa didukung oleh sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor. Adanya keterlibatan antar aktor satu sama lain dapat menyebabkan terbentuknya solidaritas warga yang dapat membantu berjalannya proses penolakan relokasi yang dilakukan. Kerja sama yang terjalin antar aktor juga menggambarkan bahwa para aktor senantiasa saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka.

5.2 Alasan Penolakan Relokasi

Pasca terjadinya penggusuran Kampung Akuarium pada 11 April 2016, warga yang menolak relokasi pun melakukan penolakan dengan beberapa strategi. Strategi pertama adalah dengan cara bertahan di Kampung Akuarium.

Proses bertahan warga dilakukan dengan cara warga yang tidak pernah benar-benar meninggalkan wilayah Kampung Akuarium. Sebagian dari mereka memutuskan untuk mengungsi di area sekitar Kampung Akuarium. Bahkan,

terdapat warga yang kembali ke Kampung Akuarium setelah berada beberapa bulan di rusunawa.

Dalam fenomena di Kampung Akuarium, terdapat warga yang bertahan dan bergerak sebagai inisiator penolakan relokasi di Kampung Akuarium yang juga disebut sebagai aktor. Selain aktor, elemen penting lainnya dalam teori pilihan rasional milik Coleman adalah keberadaan sumber daya. Keduanya merupakan hubungan antara kuasa dan kepentingan (Coleman, 2011). Di mana melalui sumber daya, aktor dapat menguasai sumber daya tersebut agar memaksimalkan penggunaan sumber daya tersebut sehingga dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya.

Bagi para aktor, program relokasi yang direkomendasikan oleh pemerintah dianggap bukanlah hal yang tepat pasca terjadinya penggusuran, beberapa informan lalu mengartikan relokasi sebagai berikut:

“Relokasi itu kan memindahkan ya, istilahnya nih kamu saya pindahkan nih, dari tempat ini ke tempat ini lagi, tapi kalo buat saya.. apa iya cuma pemindahan orangnya aja? Terus dengan pekerjaannya, dengan ekonominya kan ga langsung di tempat baru ekonominya sama, belum tentu juga punya kerjaan lagi, gitu. Kalo menurut saya relokasi itu sebelum melakukan relokasi itu mestinya dipikirkan dulu warganya, nantinya di sana kerja apa. Masa iya sih kalo kayak nelayan, tinggal di rumah susun, apa iya dekat laut? Ya taruhlah Rusun Marunda dekat laut tapi kalo di Rusun Rawa Bebek yang ada kita ga punya penghasilan sama sekali, akhirnya nganggur” (Informan 4, hasil wawancara 16 Agustus 2019)

Hal semacam ini juga diungkapkan oleh informan 1:

“Bagi saya relokasi bukanlah hal yang tepat, bayangkan saja warga yang bekerja sebagai nelayan ataupun yang sudah lama nabung untuk beli perahu. Apa mereka bisa bekerja saat pindah ke rusun? Kan ga mungkin mereka bisa kerja di darat. Ya mungkin kalo yang bekerja sebagai Gojek bisa dimana aja, tapi yang bekerja di pelabuhan bagaimana?...” (Hasil wawancara, 3 Oktober 2019)

Sementara itu, informan 2 mengatakan:

“Ya relokasi itu apa ya, bukan solusi sih dari penggusuran. Jadi, yang tadinya kita rumah yang tidak menyewa atau tidak membayar jadi membayar. Relokasi itu kan membayar atau jauh dari tempat pekerjaan yang pastinya. Jadi kalo bahas lagi relokasi bukan manusia sebenarnya. Manusia itu kan ditempatkan pada tempatnya, dan tempatnya dia dimana dia bekerja dan beralurnya disitu, pokoknya dekat gitu, di sekitar sini aja. Terus ketika dia dipindahkan berarti membuat kehidupan baru dari 0 dan ketika kehidupan baru itu bisa ngga dia langsung mendapatkan kehidupannya? Pasti ga bakal bisa, karena dari 0...” (Hasil wawancara, 11 Juni 2019)

Begitu pula hal yang diungkapkan oleh informan 3:

“... Masa sih berpuluh tahun tinggal, berpuluh tahun mandiri, punya usaha sendiri, bangun sendiri, bayar PBB dan lain sebagainya hanya dengan bahasa relokasi terus udah beres semuanya. Sedangkan kalo bahasa relokasi itu sama ga sih kehidupan itu bakal sama dengan yang sedang kita jalani. Apa di tempat relokasi itu kita bisa jualan gas sama? Bisa jualan nasi udak sama? Kan gitu kan. Atau tetangganya punya selera yang sama belinya ke kita atau gimana? Jadi hal-hal seperti itu yang dipikirin, apalagi kita ini jauh banget dipindahinnya yang kita sendiri gatau kondisi Rusun Marunda dan Cakung. Jadi, hal-hal seperti itu yang gapernah jadi pertimbangan pemerintah kan. Pemerintah saat itu. Kalo masalah sekolah mungkin di dekat itu ada segala macam, tapi bukan itu yang kami perjuangkan, bukan sekedar itu. Ada hal-hal lain yang kami perjuangkan. Bahwa adanya ketidakadilan, ada pelanggaran HAM, adanya transparansi, tidak adanya komunikasi dua arah, kan kami juga bukan sampah, kami juga bukan benda mati. Kami ini manusia, kami berkontribusi untuk Jakarta, dengan punya motor, bayar PBB, bayar pajak, dan lain sebagainya, setidaknya berikan hak kami, ruang kami untuk mengetahui kenapa kami diperlakukan seperti ini, itu sih sebenarnya, saya sih lebih ke situ idealisnya...” (Hasil wawancara, 11 Juni 2019)

Berdasarkan pernyataan di atas yang diungkapkan oleh seluruh informan/aktor, maka dapat diketahui bahwa penolakan relokasi yang dilakukan oleh inisiator warga Kampung Akuarium berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan pekerjaan sehari-hari warga. Relokasi bagi mereka dapat mengubah kehidupan sehari-hari warga, seperti kehidupan warga yang bekerja

sebagai nelayan dan bekerja di pelabuhan. Aktor menganggap bahwa jika mereka direlokasi, pekerjaan yang dapat dilakukan di rusunawa seperti berdagang tidak akan menghasilkan pendapatan karena sudah didahului oleh penghuni rusunawa lainnya yang sudah lebih dahulu berada di sana.

Selain itu, kondisi rusun tempat relokasi yang jauh juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh warga sehingga mereka menolak untuk direlokasi. Mengingat, letak ketiga rusunawa pilihan relokasi yakni Rusunawa Marunda, Cakung, dan Rawa Bebek berjarak lebih dari 20 km dari Kampung Akuarium. Lebih lanjut, diketahui pula bahwa warga memang tidak memiliki sertifikat hak milik, namun warga tetap memiliki pajak bumi dan bangunan, serta rekening listrik dan air secara legal. Informan 1 mengungkapkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa kondisi rusun yang jauh tidak memungkinkan sebagian masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan buruh pelabuhan untuk bekerja karena jika berangkat terlalu pagi belum ada kendaraan dan dapat menyebabkan mereka terlambat.

Selain itu, kekhawatiran kehidupan di rusunawa yang berbeda dengan kehidupan sosial di Kampung Akuarium juga membuat warga menolak untuk direlokasi ke rusunawa. Selain kondisi rusunawa yang berbayar, warga juga khawatir bahwa kehidupan di rusunawa akan sangat individualistik dan tidak ada kehidupan bertetangga seperti di Kampung Akuarium. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan 2 sebagai berikut:

“... Kenapa menolak? Karena berbayar, yang dulunya kita ga berbayar, tinggalnya di sini nyaman, ga perlu repot-repot naik tangga, dan yang pasti cara berkehidupannya beda kalo di rusun. Itu masing-masing yang pasti. Rusun itu masing-masing. Udah

masuk nih, masih mending begini nih, masih hidup bertetangga, kalo di rusun masuk udah. Masuk kamar udah, gaada tuh kehidupan bertetangga, ga ada. Itu yang udah.. nanya kemanapun pasti jawabnya itu...” (Hasil wawancara, 11 Juni 2019)

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan 4 bahwa jika kehidupan di Kampung Akuarium masih terdapat guyub rukun dan belum tentu di rusunawa terdapat kehidupan semacam itu:

“... ya intinya masih bisa berbaur sama tetangga yang dulu di sini, masih bisa ketemu lagi. Di sini tuh apa ya kalo kita ada acara apa kita guyub rukun, kalo di rusun kan masuk pintu, tutup pintu, masuk pintu, tutup pintu, kita gangerti. Taro lah kayak ibu rumah tangga, hal-hal sepele kurang nih, seandainya dari pasar terus kita kan suka gatau di rumah yang abis apa, tau-taunya ih abis. Kalo seandainya di rusun, pintunya tutup, kalo di sini kan “punya ini ngga” gitu minta dong gitu. Jadi udah yang hal-hal seperti itu tuh masih ada, kita tuh untungya di situ, masih bisa ketemu sama yang dulu-dulu, gitu. Kalo kadang juga orang rusun “ih coba saya di sini ya, dapet shelter enak ga mikirin bayaran apa gitu” kalo sekarang kan shelter kita kan memang ga bayar. Cuma bayar air, listrik, udah dan kita juga masih dapat perhatian khusus ya kayaknya dari Pemprov DKI, dari hal seperti KTP, segala apa-apa gitu.” (Hasil wawancara, 16 Agustus 2019)

Penolakan bagi aktor lainnya juga dipahami sebagai bentuk untuk melawan ketidakdilan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh informan 3:

“Pada saat kami menerima SP 1, SP2, dan SP 3 itu kan terlalu cepat, itu dalam waktu 11 hari kami pun harus menerima konsekuensinya relokasi ke rusun atau angkat kaki dari sini, dan itu yang saya anggap tidak berkeadilan, apalagi tanpa satu rupiah pun. Kami membangun 3 lantai-2 lantai itu dengan biaya sendiri. Kami tiap tahun bayar pajak, bayar PBB, kami punya air, punya listrik masuk secara legal... dan lain sebagainya ke kelurahan, identitas kami pun resmi, E-KTP. Kami berpuluh tahun tinggal di sini, ada riwayat yang bisa menjelaskan, tapi kenapa kami harus diperlakukan seperti yang bukan warganya, yang bukan rakyatnya gitu kan. Seakan-akan kami ini bagian dari teroris, bahwa kami ini sebagian itu adalah pendatang haram yang memang ga berhak di sini, dalam waktu 11 hari, dengan pengerahan ribuan aparat yang tidak manusiawi, kami harus mengosongkan tempat yang saya sendiri lahir di sini gitu kan. Jadi itu yang saya anggap bahwa itu adalah

sesuatu yang tidak adil. Jadi kalo memang kita merasa kita tidak... kita tidak dikasih keadilan itu, kenapa kita ga memperjuangkan?...”

(Hasil wawancara, 11 Juni 2019)

Informan 3 juga mengungkapkan bahwa banyak mendengar dari warga yang sudah tinggal di rusunawa harus mengalami usahanya yang bangkrut, tidak dapat berkembang, dan akhirnya menunggak di rusunawa karena harus membayar uang sewa rusun. Sementara itu, informan 1 juga menganggap bahwa penggusuran tersebut tidak adil karena rumah yang ia bangun dari tabungannya selama puluhan tahun lalu dihabiskan begitu saja. Belum lagi rumah warga yang misalnya memiliki 2-3 tingkat, ekonominya diberantas dan hanya digantikan dengan rusunawa. Ditambah kondisi rusunawa yang masih harus membayar uang sewa dirasakannya tidak adil.

5.3 Strategi Penolakan Relokasi

Alasan-alasan yang telah disebutkan di atas adalah beberapa hal yang menjadikan para aktor bergerak untuk melakukan penolakan relokasi. Proses penolakan pun dilakukan dengan bertahan menempati Kampung Akuarium. Pasca kejadian penggusuran, warga pun memanfaatkan area Masjid Luar Batang untuk bertahan sementara waktu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan 2:

“... Orang tua doang yang ngungsi, kalo saya tetep di sini. Yang disebut ngungsi mungkin sebulan ya yang di masjid. Setelah tergusur emang ga boleh di sini (Kampung Akuarium) tapi kita di sekitar sini...” (Hasil wawancara, 11 Juni 2019)

Sebelum mendirikan bedeng-bedeng, aula Masjid Luar Batang pun dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat pengungsian sementara. Ketika memasuki seminggu setelah penggusuran, salah satu aktor pun berinisiatif untuk mendirikan tenda sebagai tempat beribadah dan bertahan. Keberadaan

warga saat bertahan menggunakan tenda terjadi selama sekitar satu bulan sepuluh hari. Informan 1 mengungkapkan:

“Engga, waktu itu kebetulan tetangga kita ada musholla masjid itu kan, kami minta izin mereka ditampung di aula Masjid Luar Batang, lalu saya turun kebetulan gitu liat musholla hancur begitu. Kita bikin dari tenda, maksud saya pertahanan dimana lagi nih. Saya beli tenda, bikin bekas musholla dikorek-korek, ketemu lantainya, bikin tenda pake tiang-tiang, pake tenda. Saya bilang apa nih, musholla aja dulu, Al-Ikhlas kan, musholla Al-Ikhlas. Saya tulis iseng-iseng, Al-Jihad sampe terkenal Al-Jihad beberapa kali tuh, karena ini diganti oleh Pak Anies ganti aja Al-Makmur biar makmur. Sebetulnya ya penggusuran tuh Al-Jihad, bikin buat ibadah lalu bukan pertahanan juga. Jadi masyarakat bertahan disitu. Dari FPI, dari mana-mana, dari anggota DPR juga, siapa orang Golkar itu nyumbang juga, asbesnya segala dindingnya. Sepribadi mungkin bukan dari partai. Saya bertahan ya disitu, bertahan di musholla itu, bertahan di musholla, pada tidur di musholla, lalu satu2 bikin bekas-bekas triplek, dibikin tiang-tiang.” (Hasil wawancara 11 Juni 2019)

Setelah bertahan dengan cara mendirikan tenda sementara, selanjutnya warga yang bertahan pun melakukan strategi bertahan selanjutnya dengan mendirikan bedeng-bedeng. Pendirian bedeng-bedeng dilakukan sekitar tiga bulan pasca penggusuran. Strategi bertahan dengan tetap menempati wilayah yang digusur inilah yang juga menjadikan Kampung Akuarium berbeda dengan area penggusuran kampung lainnya, contohnya seperti Bukit Duri dan Kali Jodo.

“Mereka sudah tergusur, tapi memang mungkin di warganya sendiri ya bukannya merekanya ga mau melawan ya mungkin juga mereka melawan tapi ada sesuatu dan lain hal yang ga jalan dan akhirnya mereka vakum gitu kan. Itu mungkin salah satu keberuntungan kami kenapa kami bisa ini, karena salah satunya itu, menguasai lahan, kan mereka abis kegusur kan hilang semua kan. Kayak di Kali Jodo langsung hilang. Itu udah berapa bulan baru mereka nempatin lagi tapi udah berubah jadi taman kan. Itu akhirnya ga bisa kuat kan. Kalo kami kan dari awal emang menetap, tungguin lagi, tungguin lagi. Bikin bale, ancurin Satpol PP, bikin bale lagi, ancurin Satpol PP, pinggiran padahal kita.

Akhirnya kita bikin strategi bukan di dalem sini yang kita buat dulu. Luar dari pager sini. Jadi pada saat mereka ngusir, kita alesan, kita nguasain tanah lain gitu kan. Tapi, mereka lengah udah mereka ga dateng, baru kita bikin di dalem-dalem kita sendiri segala macem. Udah begitu suruh masuk semua. Kami jaga waktu itu, saya sendiri jaga sebelum kita masuk gugatan, kita di luar, lebih bikin di bedeng-bedeng luar.” (Informan 3, hasil wawancara 4 Oktober 2019)

Strategi bertahan yang dilakukan oleh para aktor dapat dikatakan sebagai tindakan yang dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan. Bagi Coleman, aktor dipandang sebagai individu yang mempunyai pilihan. Namun, yang menjadi fokus teori pilihan rasional adalah kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan pilihan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan aktor (Ritzer, 2014, p. 332). Hal ini pun menunjukkan kondisi bahwa inisiator warga yang menolak relokasi sebagai aktor bisa saja memiliki pilihan lain untuk mencapai tujuannya. Namun, pilihan berupa bertahan mendiami Kampung Akuarium dipilih sebagai tindakan aktor untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai yakni mengembalikan Kampung Akuarium seperti sebelum penggusuran.

Para aktor mengatakan bahwa sebenarnya mereka memiliki pilihan lain, seperti halnya mengungsi sementara ke tempat lain, namun mereka memilih untuk tetap bertahan di Kampung Akuarium saat melakukan penolakan relokasi. Hal ini diungkapkan oleh informan 3 sebagai berikut:

“Ya kalo saya sendiri kan karena saya lahir di sini ya, yang saya punya ya ini gitu kan. Walaupun sebenarnya di Luar Batang keluarga suami ada, punya rumah juga. Ibaratnya ada rumah saya bisa nempatin. Tapi kan bukan itu sebenarnya ya. Yang kalo saya, saya nih pribadi lebih ke agak sedikit idealis gitu kan. Ada sesuatu yang salah gitu yang dilakukan oleh pemerintah, kok main gusur gitu tanpa ada proses panjang gitu kan...” (Hasil wawancara, 4 Oktober 2019)

Informan 1 dalam hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober juga mengungkapkan bahwa ia bisa saja pindah karena pada saat itu ia juga memiliki uang, namun ia juga memikirkan keadaan warga lainnya.

Informan 1 juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat diintimidasi dengan diberikan uang sogokan dari pemerintah agar informan 1 bersedia untuk pindah ke rusunawa. Namun, atas alasan pemerintah yang tidak melakukan sosialisasi pengurusan yang benar terhadap warga, informan 1 pun menolak uang tersebut.

Sementara itu, informan lain mengatakan bahwa ia bertahan di Kampung Akuarium karena tidak adanya biaya untuk pindah ke tempat lainnya. Informan 4 mengatakan:

“Ga punya duit, karena pada waktu itu pas tanggal 11 kan Pengurusan itu. Gajian saya pasti tanggal 30 dan sudah buat bayar motor, sudah buat ngirim anak di kampung, pada waktu itu kan saya single parent ga punya suami. Gaji 2 juta 500 (Rp. 2.500.000) itu sampe mana. Nah yaudah akhirnya kebetulan juga ayo kita bertahan di sini kan kita pengusurannya juga gatau mau buat apa gitu. Gaada pemberitahuan mau buat apa. Jadi, yaudah kita sama-sama sama yang lain aja gitu” (Hasil wawancara, 16 Agustus 2019)

Dengan adanya strategi bertahan semacam ini, hal ini menunjukkan bahwa para aktor memiliki rasionalitas berupa strategi bertahan di Kampung Akuarium sekalipun hal tersebut mungkin dilakukan dengan cara yang sulit. Jika dianalisis dengan teori pilihan rasional Coleman, maka Coleman juga mengatakan bahwa individu bisa dianggap tidak selalu bertindak secara rasional. Untuk memahami sebuah rasionalitas, seseorang dapat memahami sebuah tindakan dari sudut pandang pelaku yang kemudian menjadikannya rasional (Coleman, 2011, p. 21).

Selain melakukan penolakan dengan cara bertahan di Kampung Akuarium, warga juga melakukan penolakan dengan cara melakukan gugatan *class action*. Menurut hukumonline.com, *class action* adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok (Bung Pokrol, 2003). Bersamaan dengan proses warga untuk mengajukan persyaratan untuk *class action*, warga Kampung Akuarium juga mendapatkan pengorganisasian bersama dengan LBH Jakarta. Pengorganisasian yang dimaksud yakni proses warga Kampung Akuarium saat mengajukan bukti-bukti gugatan dan akhirnya dapat membangun bedeng-bedeng di dalam area Kampung Akuarium.

Adanya pengorganisasian semacam itu juga termasuk sebagai hasil dari sumber daya yang dimiliki oleh para aktor yakni adanya relasi dengan LSM. Keberadaan LSM yang mendampingi para aktor yang menolak direlokasi menggambarkan bahwa hal tersebut memiliki kepentingan bagi para aktor.

“... Itu tuh kita mulai nyusun strategi untuk melakukan perlawanannya apa. Tadinya mah kan gugatan PTUN kan, tapi udah gabisa karena sudah lewat. Kan si Upi bilang waktu itu kan mau menggugat kan tapi ternyata ga dikerjain, ga jalan-jalan. Akhirnya, kasus kita dianggap sudah kadaluarsa, karena sudah 90 hari. Jalan satu-satunya adalah *class action*. Makanya saya ambil *class action*. *Class action* itu di bulan Oktober, setelah pengurusan berapa bulan gitu kan...” (Informan 3, hasil wawancara 4 Oktober 2019)

Proses bertahan warga di bedeng-bedeng pun berjalan selama kurang lebih selama sepuluh bulan. Berbagai pihak juga turut membantu kehidupan warga yang bertahan di Kampung Akuarium. Bantuan dari berbagai LSM,

seperti RUJAK dan Ikatan Arsitek juga berperan dalam proses bertahan warga dalam kondisi saat tidak adanya air dan listrik. Hal ini disebabkan LSM tersebut memberikan donasi untuk digunakan pada keperluan sehari-hari warga. Seiring dengan perkembangan masa transisi gubernur pada saat itu, kembali muncul wacana pengusuran kembali.

Peran informan 3 sebagai koordinator inisiator warga Kampung dalam menolak relokasi memiliki peran terhadap wacana pengusuran tersebut. Informan 3 berhasil melakukan negosiasi dengan Satpol PP wali kota untuk tidak membongkar rumah sementara warga pada saat itu. Informan 3 menjelaskan bahwa warga Kampung Akuarium sudah melakukan kontrak politik dengan gubernur (Kepemimpinan Anies Baswedan). Adanya kesepakatan ini juga didukung dengan situasi politik yang terjadi pada saat itu, di mana gubernur ingin mengembalikan lagi Kampung Akuarium yang diungkapkan pada saat kampanye. Tindakan informan 3 dalam hal ini dapat terjadi karena informan 3 memiliki sumber daya yakni sebagai aktor yang pernah menjabat sebagai pemegang kepentingan di tingkat RT Kampung Akuarium. Sehingga, sumber daya tersebut berperan bagi aktor untuk mencapai kepentingannya yakni membatalkan pengusuran rumah sementara warga.

Di tengah-tengah waktu penelitian, peneliti juga menemukan kondisi bahwa dalam proses penolakan relokasi warga, warga Kampung Akuarium pun didampingi oleh designer dari pihak RUJAK untuk mendesign kondisi Kampung Akuarium pasca pengusuran. Hasil design tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun kembali Kampung Akuarium. Jadi, design

Kampung Akuarium disusun oleh warga Kampung Akuarium dan RUJAK Center for Urban Studies sebagai pendamping. Hasil dari design perumahan antara warga Kampung Akuarium dan RUJAK pun kemudian akan diserahkan ke Dinas Perumahan.

Informan 3 mengungkapkan bahwa hasil design kampung yang diusulkan bersama akan ditunjukkan kepada pemerintah. Setelah tim kerja mengusulkan design kampung kepada pihak pemerintah, hal tersebut tidak menjadikan pemerintah langsung membangun kembali Kampung Akuarium.

Anggaran APBD yang saat itu sudah dikunci dan tidak dapat diubah menjadikan salah satu alasan yang membuat pemukiman sementara warga adalah berupa *shelter*. Lebih lanjut informan 3 mengungkapkan:

“Tadinya sih cuma kumpul-kumpul aja buat curhat-curhatan. Dari situ kita ngobrol, kalo misalnya ini boleh bisa kita ajuin atau kita boleh bangun gitu ya, kira-kira siap ga misal rumahnya ditata tapi ga seperti dulu lagi? Ga masing-masing. Tadinya mah sempet pada keberatan, maunya kan rumah masing-masing, tapi kita kan udah dapet informasi dari ini ini ini. Kalo misalnya rumahnya seperti dulu lagi, ancaman penggusurannya bisa ada lagi. Mungkin yang mau dihilangkan adalah kekumuhannya. Terus kalo misalnya ini cuma dibikin hunian doang, nilai historisnya ga ada. Sesuatu yang ditinggal di kampung ini tuh ga ada. Jadi bagaimana kita mau siap ditata tapi kita tetep bisa kembali lagi di sini dan ada jaminan kan untuk tinggal di sini. Itu juga sebenarnya sulit banget, itu juga sulit ngasih pemahaman begitu...” (Hasil wawancara, 4 Oktober 2019)

Usaha yang dilakukan oleh informan 3 adalah terkait memberi pemahaman kepada warga lainnya bahwa jika ingin Kampung Akuarium kembali, hal itu pun tidak bisa kembali sama seperti sebelum penggusuran. Terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti adanya ruang terbuka hijau. Ia juga mengatakan bahwa design Kampung Akuarium yang baru mulai disusun pada waktu pasca setahun pasca penggusuran melalui pendampingan

designer dari pihak RUJAK. Namun, karena anggaran Pemprov DKI pada saat itu sudah dikunci, maka pembangunan kampung pun belum dapat dilakukan sehingga untuk sementara hanya dapat dibangun *shelter*.

Realisasi pembangunan *shelter* di Kampung Akuarium sendiri dimulai pada tahun 2018 atau dua tahun pasca terjadinya penggusuran. Begitu pula dengan KTP warga Kampung Akuarium yang kembali diaktifkan sejak dibekukan saat penggusuran. Dalam hal ini, informan 2 sebagai aktor yang memiliki sumber daya berupa adanya kedekatan dengan pihak pemerintahan menjadikan sumber daya tersebut untuk mengembalikan KTP warga di Kampung Akuarium.

“... Pada saat setelah 100 hari kerja, Anies bilang Akuarium diperbaiki gitu kan, tapi ternyata APBD nya kan dikunci. Dia menjabat, dia tidak bisa menggunakan anggaran apapun karena Ahok udah kunci udah habis buat kedepannya lagi. Akhirnya kami diminta bersabar menggunakan CSR untuk ini. Tadinya, ini mau langsung dikerjain, jadi pada saat dicari anggaran perubahan, anggaran penetapan APBD segala macam itu ga bisa sama sekali mba... Menggunakan CSR untuk ini cuma memang konsekuensinya kami harus nunggu untuk pembangunan permanennya yang menggunakan APBD itu harus dengan anggaran yang mendatang. Ya sudah, akhirnya sama pihak RUJAK juga kita maunya begini gini, shelter segala macam untuk lebih baik kan.” (Informan 3, hasil wawancara 4 Oktober 2019)

Selain atas realisasi janji kampanye gubernur saat kepemimpinan Anies Baswedan, dibangunnya *shelter* di Kampung Akuarium merupakan salah satu bukti hasil atas tindakan penolakan relokasi yang dilakukan oleh para aktor. Adanya aktor yang sekaligus menjadi tim kerja kampung dalam melakukan penolakan relokasi serta adanya pendampingan aktif dari berbagai LSM menghasilkan adanya kesepakatan dengan pihak pemerintah yang menghasilkan adanya realisasi pembangunan *shelter*

tersebut. Hal ini menjadi fenomena yang berbeda dari perkampungan yang telah digusur lainnya. Gambar di bawah ini adalah kondisi *shelter* Kampung Akuarium yang telah dibangun:





Gambar 4. Kondisi *Shelter* Kampung Akuarium

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019)

Setelah *shelter* dibangun, terdapat pula wacana untuk mengembalikan Kampung Akuarium secara permanen. Pembahasan mengenai design permanen Kampung Akuarium antara para aktor, LSM, dan pemerintah juga disebut sebagai *Community Action Planning* (CAP). Dikutip melalui instagram @rujakrcus, CAP merupakan program penataan kampung dan masyarakat. Dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 878/2018, Kampung Akuarium juga ditetapkan sebagai salah satu kampung prioritas. Saat melakukan PRE CAP, dilakukan juga pelatihan tim kerja warga serta analisis masalah dan potensi.

“... Sekarang berproses lagi untuk, sekarang kami melakukan CAP, *Community Action Plan* dengan pemerintah sekarang. Kalo kemaren kan cuma dengan pendamping, ibaratnya bikin CAP mandiri sendiri doang kan. Kalo sekarang dengan pendamping, dengan pemerintah ada konsultan yang diutus langsung resmi melauai tender untuk dengerin maunya kita, dengerin apanya kita.

Terus bisa mengajukan design lagi yang baru gini gini gini...”

(Informan 3, hasil wawancara 4 Oktober 2019)

Design yang sudah disusun oleh aktor dan tim kerja Kampung Akuarium, selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Perumahan. Dalam usulan design, informan 3 mengungkapkan bahwa design tidak hanya memuat usulan design rumah, namun juga berupa keberadaan ruang terbuka hijau di Kampung Akuarium. Berdasarkan hal tersebut, maka saat ini warga Kampung Akuarium melakukan CAP dengan pihak pemerintah serta konsultan yang diutus secara resmi. Selain itu, berdasarkan hasil rapat terakhir antara para aktor sebagai tim kerja dengan Dinas Perumahan di bidang Perencanaan, diketahui bahwa proses pembangunan kembali Kampung Akuarium akan dimulai pada Juni 2020.

“... Kita mau tunjukkan bahwa yang kita pikirkan adalah bahwa harta kita udah tinggal di sini lagi, bukan nafsu kita yang ada di sini bahwa kita benar-benar untuk mikirin anak cucu kita bukan cuma sekedar mata pencaharian gue, gue ngontrak segala macam. Intinya bukan sekedar itu. Alhamdulillah itu ada kesepakatan, akhirnya ya kita siap dikembalikan dengan menyediakan ruang terbuka anak, ruang terbuka hijau, jalan. Ibaratnya kekumuhan itu udah kita kurang-kurangnya dari design kita...” (Informan 3, hasil wawancara 4 Oktober 2019)

Gambar di bawah ini adalah hasil design yang dibuat oleh warga Kampung Akuarium dengan didampingi oleh LSM RUJAK dalam pengerjaan design.



Gambar 5. Design Kampung Susun Bahari Aquarium

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2019)

Melalui berbagai strategi yang dilakukan para aktor dalam melakukan penolakan relokasi, hal tersebut menunjukkan bahwa para aktor tidak melakukan proses penolakan relokasi tersebut sendirian. Para aktor, selain dengan masing-masing sumber daya yang dimilikinya, seperti pernah memiliki jabatan, kepentingan, kesadaran untuk bergerak, dan sebagainya juga saling berhubungan dengan para aktor lainnya. Adanya interaksi antar aktor menjadikan para aktor dapat saling melengkapi sumber daya dan kepentingan satu dengan yang lainnya.

Sehingga, para aktor dapat mencapai kepentingan dan tujuannya dengan maksimal.



Selain adanya sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor, penolakan relokasi yang dilakukan oleh para aktor juga dilengkapi oleh sumber daya eksternal berupa adanya relasi dengan LSM. Adanya relasi semacam ini semakin memperbesar peluang para aktor untuk mencapai tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara aktor dan sumber daya adalah berupa kuasa dan kepentingan (Coleman, 2011).

Penolakan relokasi yang dilakukan oleh aktor juga dipicu oleh rasionalitas mereka yang berkaitan dengan alasan kepentingan ekonomi dan sosial yang mereka miliki di Kampung Akuarium. Dengan strategi penolakan relokasi di atas, maka para aktor melakukan tindakan yang dapat memberikan manfaat bagi aktor yakni usaha untuk mempertahankan kehidupan ekonomi dan sosial di Kampung Akuarium. Dari rasionalitas semacam itu, maka para aktor memanfaatkan sumber daya secara internal dan eksternal, seperti adanya jabatan kepentingan yang dimiliki, solidaritas warga, serta adanya relasi dengan LSM untuk mencapai tujuan mereka yakni mengembalikan Kampung Akuarium.

Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa inisiator penolakan relokasi sebagai aktor memiliki rasionalitasnya sendiri dalam melakukan proses penolakan tersebut. Bagi individu di luar warga Kampung Akuarium, bisa jadi proses penolakan relokasi yang dilakukan mereka dinilai sebagai hal yang tidak rasional. Namun, bagi para aktor, proses penolakan relokasi dengan segala strategi berupa bertahan di Kampung Akuarium, melakukan gugatan *class action*, hingga bertahan di *shelter* adalah sebuah hal yang rasional. Beberapa aktor pun mungkin memiliki pilihan untuk tinggal di luar Kampung Akuarium pasca penggusuran, namun alih-alih melakukan hal tersebut, aktor memilih untuk menetap dan bahkan

menjadi inisiator dari penolakan relokasi. Proses dibangunnya *shelter* dan adanya wacana untuk membangun kembali rumah warga secara permanen juga merupakan bentuk pencapaian aktor dalam proses penolakan relokasi tersebut.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penolakan relokasi yang dilakukan oleh aktor yakni inisiator warga Kampung Akuarium didasari atas faktor ekonomi dan sosial. Jika direlokasi, warga Kampung Akuarium khawatir akan kehilangan pekerjaan kesehariannya yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Selain itu, rusunawa tempat relokasi warga juga cukup jauh dari Kampung Akuarium. Sehingga, hal tersebut juga dapat menambah pengeluaran transportasi warga. Selain itu, penolakan relokasi juga didasari atas alasan sosial masyarakat warga. Warga menolak direlokasi karena adanya sejarah kehidupan bermasyarakat yang telah terjalin di Kampung Akuarium selama ini. Sehingga, rasionalitas para aktor adalah untuk bertahan di Kampung Akuarium dan menolak direlokasi.

Penelitian ini menggunakan analisis teori pilihan rasional milik Coleman yang memiliki indikator adanya aktor dan sumber daya. Aktor dalam penelitian ini yakni inisiator warga Kampung Akuarium yang menolak direlokasi. Penolakan relokasi yang dilakukan oleh para aktor juga dilakukan tidak semata-mata karena hanya adanya usaha dari para aktor secara internal saja. Selain melakukan penolakan relokasi dengan sumber daya individu yang dimiliki para aktor, terdapat pula faktor lain yang dapat memaksimalkan aktor dalam mencapai tujuannya yakni adanya relasi dengan LSM. Dalam hal ini, adanya relasi dengan LSM merupakan sebuah sumber daya eksternal.

Keberadaan LSM untuk mendampingi warga menjadi sumber daya yang dimanfaatkan para aktor untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan peran LSM yang mendampingi pengorganisasian warga dalam melakukan proses penolakan relokasi.

Sementara itu, strategi penolakan relokasi yang dilakukan para aktor diantaranya adalah dengan bertahan di Kampung Akuarium pasca pengrusakan, melakukan demo, dan gugatan *class action* ke pengadilan. Melalui strategi semacam itu, para aktor berusaha untuk mencapai tujuannya yakni mengembalikan Kampung Akuarium. Hal tersebut sesuai dengan asumsi teori pilihan rasional milik Coleman. Dimana dalam penelitian ini terdapat aktor yakni inisiator warga Kampung Akuarium yang melakukan penolakan relokasi dan didukung oleh adanya sumber daya baik internal maupun eksternal berupa relasi dengan LSM, juga adanya solidaritas warga yang dimanfaatkan para aktor untuk melakukan proses penolakan relokasi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka menurut penulis terdapat beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

1. Bagi Pemprov DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan diskusi bersama warga saat hendak melakukan pengrusakan dimanapun.

Adanya diskusi dengan warga diharapkan mampu memberikan jalan keluar terkait program pengrusakan yang ada di DKI Jakarta. Diskusi yang

dilakukan idealnya membahas kondisi sebelum dan sesudah penggusuran.

Sosialisasi kepada warga sebelum dilakukannya penggusuran juga

menjadi penting untuk meminimalisir adanya penggusuran yang bersifat

paksa. Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan solusi yang bijak

pasca penggusuran itu sendiri. Harapannya, adanya diskusi dengan warga

sebelum dan sesudah penggusuran dapat meminimalisir dampak kerugian

yang harus dirasakan oleh warga. Jadi, program penggusuran tidak semata-

mata bersifat menguntungkan pemerintah dan merugikan warga.

2. Bagi Akademisi

Pada penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti mengakui hanya

memfokuskan pada proses penolakan relokasi yang dilakukan oleh warga

Kampung Akuarium. Saat berada di tengah-tengah waktu penelitian,

peneliti menemukan bahwa setelah dibangunnya *shelter* pasca

penggusuran di Kampung Akuarium, terdapat rencana untuk membangun

Kampung Susun Bahari Akuarium. Namun, terkait rencana pembangunan

tersebut belum bisa dibahas lebih lanjut karena peneliti belum melakukan

penelitian mengenai hal itu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat

meneliti terkait rencana pembangunan Kampung Susun Bahari Akuarium

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2018). *Laporan Kampung Prioritas - Penyusunan Community Action Plan (CAP) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kelurahan Penjaringan di Jakarta Utara*. Jakarta.
- Apinino, R. (2017, Oktober 22). *Anies-Sandi Menang, Warga Kampung Akuarium Kembali Dirikan Rumah*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/anies-sandi-menang-warga-kampung-akuarium-kembali-dirikan-rumah-cyQb>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 10, No. 1*, 46-62.
- Bung Pokrol. (2003, Juni 20). *Class Action*. Retrieved from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2436/class-action/>
- Coleman, J. (2011). *Dasar-Dasar Teori Sosial Foundations of Social Theory*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatah, D. (2019, Oktober 17). *Pembangunan di Kampung Akuarium Sarat Pelanggaran*. Retrieved from indopos.co.id: <https://indopos.co.id/read/2019/10/17/201270/pembangunan-di-kampung-akuarium-sarat-pelanggaran/>
- Fhatoni, A. K., Purwoko, & Sardini, N. H. (2017). Perlawanan Masyarakat Luar Batang Jakarta Terhadap Kebijakan Revitalisasi Kawasan Pesisir Pada Tahun 2016. *Journal of Politics and Government Studies Vol. 6, No. 03*, 1-18.
- Hakim, A., & Legowo, M. (2015). Event Indie Clothing sebagai Sarana Konsumsi Brand Indie (Studi Rasionalitas Remaja Surabaya dalam Mengonsumsi Brand Indie di Event Indie Clothing). *Paradigma Vol. 03, No. 03*, 1-8.
- Handayani, S. (2009). Penerapan Metode Penelitian Participatory Research Apraisal dalam Penelitian Permukiman Vernakular (Permukiman Kampung Kota). *Proceeding Seminar Nasional Penelitian Arsitektur-Metoda dan Penerapannya Seri Vol. 2*.
- Heryanto. (2019, Oktober 11). *Pemprov Klaim, Rumah Lapis Kampung Akuarium Bisa Dibangun karena Masuk Zona Merah*. Retrieved from indopos.co.id: <https://indopos.co.id/read/2019/10/11/200247/pemprov-klaim-rumah-lapis-kampung-akuarium-bisa-dibangun-karena-masuk-zona-merah/>

Human Rights Watch. (2006). Indonesia: Condemned Communities Forced Evictions in Jakarta. *Human Rights Watch Vol. 18, No. 10 (C)*, 1-111.

Iqbal, M., & Vonika, N. (2019). Dinamika Proses Relokasi di DKI Jakarta Studi Kasus: Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara. *LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Vol. 1, No. 1*, 32-51.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2016). *Mereka Yang Terasing: Laporan Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Korban Penggusuran Paksa Jakarta yang Menghuni Rumah Susun*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2017). *Seperti Puing: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2016*. DKI Jakarta: LBH Jakarta.

Lestari, S., & Mudzakkir, M. (2016). Rasionalitas Memilih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Studi Kasus di Desa Dingil Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban). *Paradigma Vol. 04, No. 03*, 1-6.

Mamduh, N. (2018, April 15). *Yang Terjadi Setelah Dua Tahun Penggusuran Kampung Akuarium*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/yang-terjadi-setelah-dua-tahun-penggusuran-kampung-akuarium-cHNR>

Manggar, S. (2011). Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusiawi dan Berwibawa (BMW). *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7, No. II*, 212-227.

Mokoginta, S. R., Gosal, P., & Supardjo, S. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Relokasi Pasar Tradisional di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara. *Spasial Vol. 2, No. 2*, 143-153.

Nursyahbani, R., & Pigawati, B. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Jurnal Teknik PWK Vol. 4, No. 2*, 267-281.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2014). *Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Jakarta.

Prasetya, M. A., & Fauziah, L. (2016). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *JKMP Vol. 4, No.2*, 135-150.

Purba, D. O. (2018, Juni 30). *Pemprov DKI Kembali Aktifkan KTP Warga Kampung Akuarium*. Retrieved from Kompas.com: <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/06/30/13413391/pemprov-dki-kembali-aktifkan-ktp-warga-kampung-akuarium>

Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.

Sabrina, A. (2019, 10 14). *Kampung Akuarium yang Digusur Ahok, Dulunya Sebuah Laboratorium....*. Retrieved from megapolitan.kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/14/16035311/kampung-akuarium-yang-digusur-ahok-dulunya-sebuah-laboratorium?page=all>

Savitri, A., & Legowo, M. (2015). Racionalitas Pengrajin Industri Tas dan Koper (INTAKO) (Strategi Mempertahankan Eksistensi Pasca Bencana Luapan Lumpur Lapindo di Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo). *Paradigma Vol. 03, No. 03*, 1-10.

Sibarani, R. (2017). Visual Political Communication in Contemporary Indonesia Politics: The Red, White, and Black of the Jakarta's 2017 Gubernatorial Elections. *Paper Department of Communication - Atma Jaya Yogyakarta University (UAJY)*, 1-12.

Silalahi, R. C. (2017). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Permasalahan Relokasi Bantaran Sungai (Studi Kasus: Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat). *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1, No.2*, 488-499.

Subur, J. (2013). Analisis Kreativitas Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Berdasarkan Tingkat Kemampuan Matematika Di Kelas. *Jurnal Penelitian Pendidikan 13 (1)*, 50-55.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wanto, A. H. (2017). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *Journal of Public Sector Innovation Vol. 2, No. 1*, 39-43.

Wuisman, J. (1991). *Metoda Penelitian Ilmu Sosial*. Malang: Dwi Murni.

